



**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN KEMISKINAN TERHADAP
DISPARITAS PENDAPATAN DI KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2024**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

FUJRATUL MUMTAZAH
NIM. 2130402032

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fujratul Mumtazah
NIM : 2130402032
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk dan Kemiskinan terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024”** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,



Fujratul Mumtazah
NIM. 2130402032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Fujratul Mumtazah NIM 2130402032** dengan judul "**Pengaruh Jumlah Penduduk dan Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua Program Studi, Ekonomi Syariah



Dr. Nova Nengsih, M.A.Ek
NIP. 199011042019032008

Batusangkar, Agustus 2025

Pembimbing

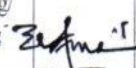
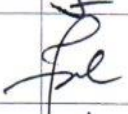



Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 197406232000032002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Fujratul Mumtazah NIM 2130402032** dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk dan Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024”** telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Ekonomi (S.E) gelar sarjana dalam program studi Ekonomi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

| No | Nama/NIP Penguji | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|----|--|-----------------------------|---|------------|
| 1. | Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA 19740623 200003 2 002 | Ketua Sidang/ Pembimbing |  | 27/8/2025 |
| 2. | Dr. Nofrivul, SE., MM., CFRM 19670624 200312 1 001 | Penguji I/ Anggota |  | 25/8/2025 |
| 3. | Lili Ramahdani, M.E 19860519 202012 2 009 | Penguji II/ Anggota |  | 22/08-2025 |

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Fujratul Mumtazah. NIM 2130402023. Judul Skripsi: "Pengaruh Jumlah Penduduk dan Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024". Program S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penelitian ini mengangkat masalah disparitas pendapatan yang merupakan masalah klasik ekonomi di daerah-daerah berkembang terkhusus Provinsi Sumatera Barat. Fenomena yang terjadi di Sumatera Barat yaitu disparitas pendapatan di perkotaan masih mengalami trend daripada hal ini menimbulkan pertanyaan terkait faktor apakah yang mempengaruhi erbedaan ini apakah jumlah penduduk di kota yang lebih banyak dan kemiskinan lebih tinggi ataukah ada hal lain. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif yaitunya untuk melihat pengaruh antara variable. Teknik pengumpulan data dokumentasi dengan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu regresi data panel dengan jumlah cross section 19 kabupaten dan kota dan time series 5 tahun menggunakan alat bantu Eviews 12. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh tersebut yaitu uji hipotesis signifikansi parsial (uji-t) uji signifikansi simultan (uji-F) .

Penelitian ini menunjukkan Jumlah Penduduk (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan, temuan penelitian ini menunjukkan adanya factor lain dari perbedaan disparitas pendapatan antara perkotaan dan pedesaan, bukan disebabkan banyaknya penduduk di perkotaan. Namun, Kemiskinan (X2) berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa harus dilakukan kebijakan pengentasan kemiskinan untuk pemeratakan disparitas pendapatan. Secara simultan atau keseluruhan Jumlah Penduduk (X1), dan Kemiskinan (X2), memiliki pengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan.

Kata kunci: Jumlah Penduduk, Kemiskinan, Disparitas Pendapatan

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI | |
| ABSTRAK | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 9 |
| C. Batasan Masalah | 9 |
| D. Rumusan Masalah..... | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Manfaat Penelitian | 10 |
| G. Defenisi Operasional | 11 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 13 |
| A. Landasan Teori | 13 |
| 1. Disparitas Pendapatan..... | 13 |
| 2. Jumlah Penduduk..... | 24 |
| 3. Kemiskinan | 30 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 40 |
| C. Kerangka Penelitian..... | 43 |
| D. Hipotesis Penelitian..... | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 44 |
| B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian..... | 44 |
| C. Sumber Data | 45 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 45 |

| | |
|--|-----------|
| E. Teknik Analisis Data | 45 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 54 |
| A. Gambaran Umum | 54 |
| 1. Kondisi Geografis Wilayah | 54 |
| 2. Kondisi Demografis Penduduk..... | 56 |
| 3. Kondisi Sosial dan Budaya | 57 |
| B. Deskripsi Data Penelitian | 58 |
| C. Hasil Penelitian..... | 61 |
| 1. Estimasi Model Regresi Data Panel..... | 62 |
| 2. Pemilihan Model Regresi Data Panel | 66 |
| 3. Uji Asumsi Klasik..... | 68 |
| 4. Regresi Data Panel..... | 72 |
| 5. Uji Hipotesis | 74 |
| D. Pembahasan | 78 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 85 |
| A. Kesimpulan..... | 85 |
| B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Disparitas Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten & Kota Sumatera Barat..... | 4 |
| Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk di Kabupaten & Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... | 5 |
| Tabel 1. 3 Kemiskinan Kabupaten & Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 | 7 |
| Tabel 3. 1 Waktu Penelitian | 44 |
| Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk di Kabupaten & Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... | 56 |
| Tabel 4. 2 Disparitas Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten & Kota Sumatera Barat..... | 57 |
| Tabel 4. 3 Data keseluruhan variable | 61 |
| Tabel 4. 4 Hasil Common Effect Model | 62 |
| Tabel 4. 5 Hasil Fixed Effect Model..... | 64 |
| Tabel 4. 6 Random Effect Model..... | 65 |
| Tabel 4. 7 Hasil uji chow | 67 |
| Tabel 4. 8 Uji Hausman | 68 |
| Tabel 4. 9 Hasil Fixed Effect Model..... | 69 |
| Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinieritas | 70 |
| Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 71 |
| Tabel 4. 12 Hasil Fixed Effect Model..... | 72 |
| Tabel 4. 13 Hasil Uji t..... | 75 |
| Tabel 4. 14 Hasil Uji f..... | 76 |
| Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi | 77 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2. 1 Kurva Lorenz..... | 17 |
| Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir..... | 43 |
| Gambar 4. 1 Peta Provinsi Sumatera Barat..... | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disparitas pendapatan merupakan masalah klasik ekonomi dan serius yang sedang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Arti dari disparitas pendapatan atau disebut juga ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan antara kelompok yang berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah (Harahap, 2024).

Melihat fenomena tersebut World Bank membuat program sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada 10 butir. Butir kesepuluh dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals adalah mengurangi disparitas (World Bank, 2023).

Tujuan setiap negara di dunia dalam proses pemerintahan mereka adalah kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai kebijakan agar memastikan proses pembangunan di negaranya dapat berjalan sesuai rencana serta dapat berdampak signifikan bagi kesejahteraan warganya. Disparitas pendapatan juga menjadi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Di Indonesia bisa dilihat pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tingkat disparitas di Indonesia menunjukkan angka pada tingkat ketimpangan yang sedang. Hal ini menunjukkan jika kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya pada level provinsi masih belum maksimal dalam menurunkan tingkat disparitas pendapatan di daerah mereka (Santoso & Mukhlis, 2021).

Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Barat, yang terletak di pulau Sumatera, dikenal dengan kekayaan budaya dan alamnya. Salah satu pendistribusian pendapatan dan kekayaan di Sumatera barat yang terkenal bahkan satu satunya di Negara bahkan Dunia yaitu budaya matrilineal atau

garis keturunan diwariskan melalui Ibu. Daerah ini memiliki beragam potensi ekonomi, termasuk pertanian, pariwisata, dan industri. Meskipun demikian, disparitas pendapatan tetap menjadi isu yang di provinsi ini, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dikutip dari berita Website Suara Sumatera Barat pada 2023 dengan narasumbernya yaitu kepala BPS Sumatera Barat Sugeng Arianto yang menjelaskan bahwa masalah perbedaan dalam disparitas pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan penjelasan tersebut disparitas pendapatan di perkotaan masih mengalami trend daripada pedesaan yang menunjukkan distribusi pendapatan lebih rendah. Hal ini menjadi masalah yang harus diperhatikan karena fenomena tersebut punya tantangan tersendiri. Dari masalah perbedaan disparitas pendapatan di perkotaan dan pedesaan ini timbul pertanyaan apakah factor penyebab yang mempengaruhi lebih tingginya disparitas pendapatan di perkotaan, apakah disebabkan oleh lebih tingginya penduduk di kota daripada di desa atau tingginya kemiskinan atau ada factor lain. Untuk itu perlu dilakukan penelitian ini (Arianto, 2023).

Menurut argumen empiris Todaro dan Smith yang menjelaskan tentang disparitas pendapatan menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang meningkat semakin pesat dan kemiskinan yang meningkat semakin luas kemudian setelahnya disparitas pendapatan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan kemiskinan yang meluas memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan terutama di kalangan kelompok miskin. Peningkatan jumlah penduduk khususnya di kalangan yang paling rentan meningkatkan tekanan pada sumber daya dan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang sering kali mengalami penghematan anggaran pemerintah sehingga mengurangi akses kelompok miskin terhadap program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Todaro, 2020).

Kemiskinan memperburuk disparitas pendapatan, karena kelompok miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga kerentanan terhadap bencana alam dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan kemiskinan sangat

penting untuk dipahami karena keduanya berkontribusi pada semakin melebar disparitas pendapatan dan menciptakan tantangan serius bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Todaro, 2020).

Secara teoritis disparitas pendapatan menciptakan ketidakadilan sosial yang signifikan di mana 20 persen penduduk terkaya sering kali menguasai sebagian besar sumber daya, sementara 40 persen penduduk termiskin mendapatkan porsi yang sangat kecil dari pendapatan nasional. Oleh karena itu evaluasi pembangunan ekonomi harus meliputi analisis tentang bagaimana pendapatan didistribusikan di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tetapi juga menjangkau seluruh populasi (Todaro, 2020).

Indeks gini rasio adalah alat yang digunakan sebagai ukuran dalam menentukan atau pun melihat tingkat disparitas pendapatan. Indeks gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang diukur menggunakan kurva lorenz. Indeks gini bernilai antara 0 hingga 1. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 maka menunjukkan adanya disparitas yang rendah, jika disparitas besar dari 0,3 dan kurang dari 0,5 maka menunjukkan adanya disparitas yang sedang, sedangkan jika nilai indeks gini besar dari 0,5 sampai mendekati 1 maka menunjukkan adanya disparitas yang tinggi (Todaro, 2020).

Pada data yang dikumpulkan melalui Badan Pusat Statistik disparitas pendapatan diukur menggunakan satuan gini ratio, yang menunjukkan seberapa merata distribusi pendapatan dalam masyarakat. Gini ratio berkisar antara 0 (disparitas rendah) hingga 1 (disparitas sangat tinggi) sama seperti pada teori (Badan Pusat Statistik, 2020).

Tabel 1. 1
Disparitas Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten & Kota Sumatera Barat

| No | Kabupaten & Kota | Gini Ratio (%) | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab.Kep.Mentawai | 0.273 | 0.321 | 0.233 | 0.259 | 0.267 |
| 2 | Kab.Pesisir Selatan | 0.264 | 0.253 | 0.246 | 0.259 | 0.224 |
| 3 | Kab.Solok | 0.277 | 0.246 | 0.243 | 0.235 | 0.241 |
| 4 | Kab.Sijunjung | 0.269 | 0.270 | 0.243 | 0.263 | 0.239 |
| 5 | Kab.Tanah Datar | 0.273 | 0.250 | 0.251 | 0.260 | 0.258 |
| 6 | Kab.Padang Pariaman | 0.257 | 0.269 | 0.245 | 0.257 | 0.253 |
| 7 | Kab.Agam | 0.278 | 0.272 | 0.298 | 0.255 | 0.249 |
| 8 | Kab.Lima Puluh Kota | 0.222 | 0.244 | 0.208 | 0.194 | 0.220 |
| 9 | Kab.Pasaman | 0.310 | 0.248 | 0.230 | 0.243 | 0.217 |
| 10 | Kab.Solok Selatan | 0.307 | 0.277 | 0.253 | 0.271 | 0.313 |
| 11 | Kab.Dharmasraya | 0.280 | 0.268 | 0.287 | 0.291 | 0.233 |
| 12 | Kab.Pasaman Barat | 0.258 | 0.261 | 0.277 | 0.238 | 0.240 |
| 13 | Kota Padang | 0.312 | 0.343 | 0.354 | 0.312 | 0.324 |
| 14 | Kota Solok | 0.286 | 0.277 | 0.288 | 0.256 | 0.251 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 0.300 | 0.295 | 0.314 | 0.308 | 0.299 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0.394 | 0.306 | 0.296 | 0.273 | 0.266 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 0.265 | 0.286 | 0.317 | 0.255 | 0.272 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 0.325 | 0.316 | 0.311 | 0.316 | 0.313 |
| 19 | Kota Pariaman | 0.310 | 0.301 | 0.272 | 0.289 | 0.281 |
| 20 | Provinsi Sumatera Barat | 0.305 | 0.306 | 0.300 | 0.280 | 0.283 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Data disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan dari kategori sedang ke rendah dengan angka menurun dari 0,305 pada tahun 2020 menjadi 0,283 pada tahun 2024. Sebagian besar kabupaten, seperti Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, dll, menunjukkan disparitas rendah. Di sisi kota contohnya Kota Padang berada dalam kategori sedang dengan fluktuasi signifikan. Meskipun disparitas pendapatan tergolong rendah di daerah pedesaan dan lebih tinggi di daerah perkotaan hal ini menunjukkan tantangan yang perlu di atasi untuk mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik di provinsi ini.

Dalam konteks teori tentang disparitas pendapatan yang dijelaskan angka disparitas di Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota di dalamnya mencerminkan sejauh mana distribusi pendapatan tidak merata di antara

masyarakat. Jika angka disparitas menunjukkan tren yang tidak berkembang ke arah yang lebih baik, maka perlu intervensi yang lebih besar untuk memastikan bahwa manfaat dari pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh segelintir orang. Oleh karena itu, angka disparitas di Sumatera Barat menjadi indikator penting untuk menilai keadilan sosial dan keberhasilan pembangunan yang inklusif.

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk di Kabupaten & Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

| No | Kabupaten & Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 87623 | 88389 | 89401 | 91430 | 92760 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 504418 | 509618 | 516518 | 525360 | 532910 |
| 3 | Kab. Solok | 391497 | 394237 | 397829 | 405380 | 410430 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 235045 | 237313 | 240317 | 243710 | 246780 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 371704 | 373693 | 376276 | 383680 | 388230 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 430626 | 433018 | 436129 | 451390 | 459170 |
| 7 | Kab. Agam | 529138 | 534202 | 540905 | 551890 | 55930 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 383525 | 385634 | 388375 | 396430 | 401090 |
| 9 | Kab. Pasaman | 299851 | 303103 | 307425 | 31320 | 318080 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 182027 | 184854 | 188649 | 191540 | 195030 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 228591 | 231217 | 234713 | 239920 | 244030 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 431672 | 436313 | 442479 | 450050 | 456470 |
| 13 | Kota Padang | 909040 | 913448 | 919145 | 942940 | 954180 |
| 14 | Kota Solok | 73438 | 74469 | 75850 | 77840 | 79460 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 65138 | 65687 | 66413 | 67760 | 68730 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 56311 | 56971 | 57850 | 58630 | 59450 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 121028 | 121588 | 122311 | 124050 | 125020 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 139576 | 141184 | 143325 | 144830 | 146730 |
| 19 | Kota Pariaman | 94224 | 95294 | 96719 | 97210 | 98340 |
| 20 | Provinsi Sumatera Barat | 5534472 | 5580232 | 5640629 | 5757210 | 5836160 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan total penduduk provinsi mencapai 5.836.200 jiwa. Kenaikan ini juga terlihat di kabupaten dan kota, di mana Kabupaten Pesisir Selatan mencatat jumlah penduduk tertinggi dengan 532.910 jiwa, sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki jumlah terendah, yaitu 92.760 jiwa. Di sisi kota, Kota Padang sebagai kota dengan

penduduk tertinggi mencapai 954.180 jiwa, sedangkan Kota Solok mencatat 79.460 jiwa. Meskipun Provinsi Sumatera Barat memiliki populasi yang besar, terdapat disparitas yang signifikan dalam jumlah penduduk antar kabupaten dan kota, mencerminkan peran penting provinsi ini sebagai pusat sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan dua tabel yaitu data disparitas pendapatan dan jumlah penduduk kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat terdapat perbedaan dengan teori. Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah penduduk tidak sejalan dengan penurunan disparitas pendapatan. Ketidakcocokan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk biasanya akan meningkatkan disparitas pendapatan. Namun pada Kabupaten Kepulauan Mentawai, meskipun jumlah penduduk meningkat dari 88.389 jiwa pada tahun 2020 menjadi 89.401 jiwa pada tahun 2022, disparitas pendapatan justru mengalami penurunan dari 0.32 menjadi 0.23. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi tidak serta merta meningkatkan disparitas pendapatan di daerah tersebut, mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi disparitas pendapatan.

Selanjutnya, mewakili kota-kota pada Kota Sawahlunto, jumlah penduduk meningkat dari 65.138 jiwa pada awalnya di tahun 2020 menjadi 68,73 ribu jiwa pada akhirnya ditahun 2024, sementara disparitas pendapatan justru stabil pada awalnya 0,3 pada tahun 2020 dan 2021 kemudian naik 0,31 pada tahun 2022 dan 2023 dari 0.31 menjadi 0.3 kembali pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan populasi tidak selalu berbanding lurus dengan disparitas pendapatan, dan ada kemungkinan bahwa kebijakan lokal berhasil mereduksi disparitas.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum teori menyatakan bahwa pertumbuhan populasi dapat meningkatkan disparitas pendapatan, kenyataannya di lapangan dapat berbeda, tergantung pada berbagai faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi masalah yang perlu diteliti karena dengan data yang ada dapat dilakukan pengujian terhadap teori-teori yang dikemukakan para ahli.

Tabel 1. 3
Kemiskinan Kabupaten & Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

| No | Kabupaten & Kota | Kemiskinan (%) | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab.Kep.Mentawai | 14.35 | 14.84 | 13.97 | 13.72 | 13.89 |
| 2 | Kab.Pesisir Selatan | 7.61 | 7.92 | 7.11 | 7.34 | 7.49 |
| 3 | Kab.Solok | 7.81 | 8.01 | 7.12 | 7.13 | 7.31 |
| 4 | Kab.Sijunjung | 6.78 | 6.80 | 6.00 | 5.88 | 5.78 |
| 5 | Kab.Tanah Datar | 4.40 | 4.54 | 4.26 | 4.16 | 4.28 |
| 6 | Kab.Padang Pariaman | 6.95 | 7.22 | 6.25 | 6.34 | 6.27 |
| 7 | Kab.Agam | 6.75 | 6.85 | 6.22 | 6.60 | 6.83 |
| 8 | Kab.Lima Puluh Kota | 6.86 | 7.29 | 6.59 | 6.80 | 6.92 |
| 9 | Kab.Pasaman | 7.16 | 7.48 | 6.85 | 6.80 | 6.74 |
| 10 | Kab.Solok Selatan | 7.15 | 7.52 | 6.51 | 6.45 | 6.56 |
| 11 | Kab.Dharmasraya | 6.23 | 6.67 | 5.56 | 5.56 | 5.32 |
| 12 | Kab.Pasaman Barat | 7.04 | 7.51 | 6.93 | 6.92 | 7.00 |
| 13 | Kota Padang | 4.40 | 4.94 | 4.26 | 4.17 | 4.06 |
| 14 | Kota Solok | 2.77 | 3.12 | 3.02 | 3.05 | 3.07 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 2.16 | 2.38 | 2.28 | 2.27 | 2.33 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 5.24 | 5.92 | 5.14 | 5.24 | 5.31 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 4.54 | 5.14 | 4.46 | 4.11 | 4.08 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 5.65 | 6.16 | 5.66 | 5.44 | 5.19 |
| 19 | Kota Pariaman | 4.10 | 4.38 | 4.13 | 4.20 | 4.26 |
| 20 | Provinsi Sumatera Barat | 6.28 | 6.63 | 5.92 | 5.95 | 5.97 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi, dimulai dari 6,28% pada tahun 2020, meningkat menjadi 6,63% pada tahun 2021, sebelum turun signifikan menjadi 5,92% pada tahun 2022, dan sedikit meningkat kembali menjadi 5,95% pada tahun 2023, serta mencapai 5,97% pada tahun 2024. Di tingkat kabupaten dan kota terdapat variasi yang signifikan dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat angka kemiskinan tertinggi sebesar 14,84% pada tahun 2021, sementara Kota Solok dan Kota Sawahlunto memiliki angka terendah, masing-masing 2,77% dan 2,16% pada tahun 2020. Beberapa kabupaten seperti Sijunjung dan Tanah Datar menunjukkan penurunan konsisten dalam angka kemiskinan, sedangkan Kabupaten Padang Pariaman dan Agam mengalami fluktuasi yang lebih besar. Meskipun ada penurunan angka

kemiskinan tetap saja disparitas antar kabupaten dan kota menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terfokus untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah.

Setelah melihat teori ternyata bertolak belakang dengan teori pada saat kemiskinan turun tidak dapat mempengaruhi disparitas pendapatan agar ikut turun karena dilihat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai walau tidak terlalu signifikan kemiskinan turun dari 14% menjadi 13,7% pada tahun 2022 ke 2023 sedangkan disparitas pendapatan malah naik dari 0,23 ke 0,26 pada tahun tersebut. Maka terdapat permasalahan perbedaan antara data di lapangan dengan teorinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu diikuti dengan penurunan dalam angka disparitas pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Sebaliknya begitupun kenaikan kemiskinan tidak mempengaruhi naiknya angka disparitas pendapatan seperti data di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 ke 2021 disparitas pendapatan mengalami penurunan dari 0,26 ke 0,25 walaupun kemiskinan sedang naik dari 7,61 menjadi 7,92 pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan meningkat disparitas pendapatan dapat menurun.

Ini menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan tidak selalu berimbang negatif terhadap disparitas pendapatan. Bisa diperkirakan mungkin disebabkan oleh faktor lainnya yang berhasil mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Untuk daerah perkotaan di Kota Solok, terjadi penurunan disparitas pendapatan dari 0,29 pada tahun 2020 menjadi 0,28 pada tahun 2021, meskipun kemiskinan meningkat dari 2,77% menjadi 3,12%. Ini menunjukkan bahwa meskipun lebih banyak orang yang jatuh ke dalam kemiskinan disparitas pendapatan dapat menurun, menunjukkan kompleksitas situasi ekonomi di daerah tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pemahaman hubungan antara kemiskinan dan disparitas pendapatan, di mana data di lapangan tidak selalu selaras dengan teori yang ada. Oleh karena itu terdapat juga permasalahan yang membuat kemiskinan

tidak dapat mempengaruhi disparitas pendapat namun untuk menguji teori perlulah dilakukan penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, diangkatlah masalah Jumlah Penduduk dan Kemiskinan terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten & Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 yang memiliki beberapa kemungkinan masalah sebagai berikut:

1. Perbedaan antara teori mengenai sama kin pesatnya jumlah penduduk meningkatkan disparitas pendapatan dengan data yang terjadi dilapangan di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.
2. Perbedaan antara teori mengenai meluasnya kemiskinan meningkatkan disparitas pendapatan dengan data yang terjadi dilapangan di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.
3. Perbedaan antara teori mengenai semakin pesatnya jumlah penduduk dan meluasnya kemiskinan meningkatkan disparitas pendapatan dengan data yang terjadi dilapangan di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.
4. Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat yang tidak merata.
5. Disparitas Pendapatan di Kota lebih besar dibandingkan di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas terlihat masalah Jumlah Penduduk, Kemiskinan, terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten & Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 yang kompleks. Agar penelitian ini lebih fokus, maka dibatasi pula masalahnya. Untuk itu, masalah yang akan diteliti dibatasi pada salah faktor dari contoh masalah berikut:

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

2. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.
3. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

D. Rumusan Masalah

1. Seberapa Besar Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024?
2. Seberapa Besar Pengaruh Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024?
3. Seberapa Besar Pengaruh Jumlah Penduduk dan Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk dan Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

F. Manfaat Penelitian

Sebagai mana diuraikan mengenai tujuan penelitian di atas maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan penerapan ilmu-ilmu yang diperoleh selama

perkuliahan serta penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya dan menjadi khasanah pengetahuan mengenai pengaruh jumlah penduduk dan kemiskinan terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.

- b. Manfaat Praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu penunjang dalam membuat kebijakan terutama dalam pembangunan ekonomi.
- c. Manfaat Praktis yaitu sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambahkan keilmuan bagi mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

G. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini diantara lain:

Disparitas Pendapatan dalam penelitian ini adalah disparitas pendapatan atau berupa data gini ratio yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat yang dinyatakan dalam bentuk rasio dengan angka bilangan desimal.

Jumlah Penduduk dalam penelitian ini adalah berupa data jumlah penduduk pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat yang dinyatakan dalam bentuk jumlah

dengan satuan jiwa.

Kemiskinan dalam penelitian ini adalah berupa data persentase penduduk miskin atau penduduk dibawah garis kemiskinan yang persentasenya menjadi tolak ukur kemiskinan. Pada penelitian ini adalah data tahunan setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Disparitas Pendapatan

a. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, disparitas dapat disamakan dengan beberapa kata yaitu perbedaan, jarak, ketimpangan, dan kesenjangan, yang artinya hal yang tidak sebagaimana semestinya atau dapat pula diartikan sebagai ketidakadilan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kesenjangan atau perbedaan yang jelas antara dua objek, individu, atau kelompok dalam berbagai aspek atau karakteristik. Bisa disimpulkan disparitas tersebut adalah kebalikan dari pemerataan ataupun keseimbangan. Dimana dalam konteks perekonomian keseimbangan dan pemerataan tersebut merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tujuan kemakmuran suatu negara (KBBI, 2025).

Menurut Paul A Samuelson dan Wiliam pendapatan berasal dari kata dapat yang memiliki beragam arti jika ditambah imbuhan, namun pendapatan sendiri merujuk kepada pencarian ataupun penghasilan. Dimana pendapatan merupakan hasil usaha atau kerja seseorang atau kelompok. Pendapatan menurut Samuelson berarti penerimaan total atau kas yang diperoleh oleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan dividen), dan tunjangan transfer pemerintah (Hendra, 2021).

Dari kedua pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa disparitas pendapatan adalah ketimpangan yang terjadi dalam pendapatan baik secara perkapita maupun secara nasional ataupun dalam level provinsi, yang mencerminkan kebalikan dari kesejahteraan ataupun pertumbuhan dalam konteks perekonomian.

Konteks distribusi pendapatan dan disparitas, penting untuk memahami bahwa disparitas ekonomi tidak hanya terjadi antara negara kaya dan miskin, tetapi juga di dalam negara-negara berkembang itu sendiri. Disparitas pendapatan menciptakan ketidakadilan sosial yang signifikan, di mana 20 persen penduduk terkaya sering kali menguasai sebagian besar sumber daya, sementara 40 persen penduduk termiskin mendapatkan porsi yang sangat kecil dari pendapatan nasional. Oleh karena itu, evaluasi pembangunan ekonomi harus meliputi analisis tentang bagaimana pendapatan didistribusikan di seluruh lapisan masyarakat, untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga menjangkau seluruh populasi

Disparitas pendapatan yang terjadi di masing-masing daerah dapat juga akan menyebabkan kecemburuan sosial antara golongan orang-orang yang memiliki pendapatan rendah dengan golongan orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi. Seperti yang dibahas oleh Todaro & Smith dalam bukunya disparitas pendapatan antara negara kaya dan negara miskin semakin memburuk, dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Fenomena ini dapat dilihat melalui rasio pendapatan antara 20 persen penduduk terkaya dan 20 persen penduduk termiskin di dunia. Pada tahun 1960, rasio tersebut adalah 30:1, yang menunjukkan bahwa pendapatan orang terkaya 30 kali lipat lebih besar daripada yang termiskin. Namun, pada tahun 2000, rasio ini meloncat menjadi 70:1, mencerminkan peningkatan ketidakmerataan yang dramatis. Dampak dari disparitas ini sangat signifikan. Misalnya, 1 persen orang terkaya di dunia memiliki pendapatan yang setara dengan jumlah pendapatan 57 persen penduduk termiskin. Ini berarti hanya sekitar 50 juta orang yang mendapatkan pendapatan yang sama banyaknya dengan 2,7 miliar orang lainnya. Situasi ini menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam dan memperburuk kondisi kemiskinan di banyak negara (Todaro, 2020).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan meningkatkan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sedangkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang cukup baik hanya akan dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat. Sehingga kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan disparitas pendapatan. Disparitas merupakan fenomena alami yang pasti terjadi. Oleh sebab itu, disparitas tidak dapat dihapuskan, melainkan hanya bisa diredam ke tingkat yang bisa ditoleransikan oleh sistem sosial tertentu agar harmoni dalam sistem tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya.

Menurut Todaro dan Smith ruginya disparitas yang tinggi dijelaskan bahwasannya, disparitas pendapatan yang tinggi memiliki beberapa kerugian signifikan bagi masyarakat, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1) Ineffisiensi Ekonomi

Akses kredit terbatas yaitu disparitas yang ekstrem mengurangi kesempatan individu berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pinjaman, yang berdampak pada pendidikan dan pengembangan usaha. Rendahnya tingkat tabungan yaitu orang kaya lebih cenderung menyimpan kekayaan dalam bentuk barang mewah dan tidak berkontribusi pada investasi produktif, sehingga mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi.

2) Alokasi Aset yang Tidak Efisien

Pendidikan yang tidak merata yaitu disparitas tinggi menyebabkan tekanan pada pendidikan tinggi, mengorbankan pendidikan dasar yang berkualitas. Ini memperlebar kesenjangan pendapatan di masa depan. Inefisien dalam pertanian yaitu kepemilikan tanah yang sangat tidak merata mengarah pada inefisiensi dalam penggunaan lahan, yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

3) Kelemahan Stabilitas Sosial

Mengurangi solidaritas yaitu disparitas yang tinggi melemahkan hubungan sosial antar kelas, menciptakan ketegangan dan konflik. Kekuatan politik golongan kaya yaitu isparitas pendapatan memperkuat pengaruh politik golongan kaya, yang dapat memanipulasi kebijakan untuk kepentingan pribadi, mengarah pada korupsi dan pengalihan sumber daya.

4) Ketidakadilan Sosial

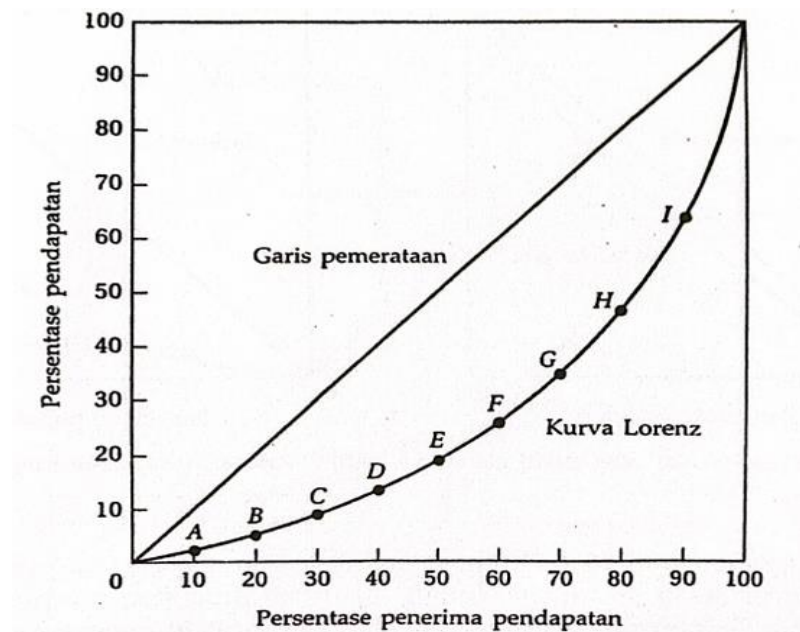
Cadar ketidaktahuan ide John Rawls menunjukkan bahwa banyak orang, jika tidak tahu posisi sosial mereka, akan memilih distribusi pendapatan yang lebih merata karena ketidakpastian akan nasib mereka (Todaro, 2020).

b. Pengukuran Disparitas Pendapatan

Pengukuran yang paling umum menurut teory yaitu menggunakan Kurva Lorenz. Metode lainnya yang lazim dipakai untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan kurva Lorenz (Lorenz curve)². Gambar 2.1 menunjukkan mekanisme kerja kurva tersebut. Jumlah penerima pendapatan dinyatakan pada sumbu horizontal, tidak dalam arti absolut melainkan dalam persentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20 persen dari jumlah total penduduk.

Pada titik 60 terdapat 60 persen kelompok bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung yang meliputi 100 persen atau seluruh populasi atau jumlah penduduk. Sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari pendapatan total yang diterima oleh masing-masing persentase kelompok penduduk tersebut. Sumbu tersebut juga berakhir pada titik 100 persen, sehingga berarti bahwa kedua sumbu (vertikal dan horizontal) sama panjangnya. Peraga ini secara keseluruhan berbentuk bujur sangkar, dan dibelah oleh sebuah garis diagonal yang ditarik dari titik nol pada sudut kiri bawah (titik

asal) menuju ke sudut kanan atas. Pada setiap titik yang terdapat pada garis diagonal itu, persentase pendapatan yang diterima persis sama dengan persentase jumlah penerimanya-misalnya, titik tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk. Titik yang terletak pada posisi tiga perempat garis diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan kepada 75 persen dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, garis diagonal dalam Peraga 5.1 melambangkan "pemerataan sempurna" (perfect equality)" dalam distribusi ukuran pendapatan. Masing-masing persentase kelompok penerima pendapatan menerima persentase pendapatan total yang sama besarnya; contohnya, 40 persen kelompok terbawah akan menerima 40 persen dari pendapatan total, sedangkan 5 persen kelompok teratas hanya menerima 5 persen dari pendapatan total.



Gambar 2. 1
Kurva Lorenz

Disparitas pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Disparitas ini terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya pemerataan

pendapatan di negara-negara berkembang. World Bank mengatakan indikator kunci untuk memandu pekerjaannya, jumlah negara dengan disparitas tinggi didefinisikan sebagai indeks Gini di atas 40). Indikator Disparitas Menurut Bank Dunia atau *World Bank* sebagai berikut:

- 1) Disparitas Tinggi 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima < 12% dari total pendapatan.
- 2) Disparitas Sedang 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima 12%-17% dari total pendapatan.
- 3) Disparitas Rendah 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima > 17% dari total pendapat (World Bank, 2020).

Di Indonesia adanya masalah disparitas pendapatan ada di wilayah daerah yang ada di Indonesia. Disparitas pendapatan di Indonesia terjadi fluktuatif setiap tahunnya, besarnya angka disparitas pendapatan di Indonesia dapat dilihat dari nilai indeks gini rasio. Menurut BPS Indeks gini rasio adalah alat yang digunakan sebagai ukuran dalam menentukan atau pun melihat tingkat disparitas pendapatan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Indeks gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antar diagonal, kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Indeks gini bernilai antara nol hingga satu. Jika nilai indeks gini mendekati nol maka menunjukkan adanya disparitas yang rendah sedangkan jika nilai indeks gini mendekati satu maka menunjukkan adanya disparitas yang tinggi. Indeks gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran data yang diperlukan dalam penghitungan indeks gini yaitu jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks gini adalah:

$$G = \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1} - 1)}{1000}$$

Keterangan:

G = Indeks gini

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-1

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas -i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas -i

K = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai indeks gini berkisar antara 0, dan 1, jika;

G < 0,3 = disparitas rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 = disparitas sedang

G > 0,5 d) = disparitas tinggi (Badan Pusat Statistik, 2020).

c. Faktor Penyebab Disparitas Pendapatan

Menurut argumen empiris Todaro dan Smith tentang tujuh konsekuensi negatif membahas beberapa faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan yaitu;

- 1) Pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk khususnya di kalangan yang paling rentan meningkatkan tekanan pada sumber daya dan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang sering kali mengalami penghematan anggaran pemerintah sehingga mengurangi akses kelompok miskin terhadap program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Todaro, 2020).
- 2) Kemiskinan. Kemiskinan memperburuk disparitas pendapatan, karena kelompok miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga kerentanan terhadap bencana alam dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan kemiskinan sangat penting untuk dipahami karena keduanya berkontribusi pada semakin melebar disparitas pendapatan dan menciptakan tantangan serius bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro, 2020).

Faktor yang mempengaruhi Disparitas menurut Arsyad salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antara penduduk kaya dan penduduk miskin yang semakin timpang. Oleh karena itu ketika semakin meluasnya kemiskinan maka tidak tercapainya pengurangan disparitas pendapatan yang berarti pada angka kemiskinan mengakibatkan disparitas pendapatan semakin meningkat. Oleh sebab itu, penurunan kemiskinan sangat diperlukan, agar ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin rendah. Adapun beberapa penelitian terkait hubungan pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan pada sumber lainnya sebagai tambahan sebagai berikut.

- 1) Hassan et al. (2015) menyatakan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
- 2) Syawie (2011) mengungkapkan bahwa pada proporsi tertentu, kemiskinan memang berkaitan dengan kesenjangan.
- 3) Menurut Baharuddin (2017) Ketimpangan pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan relatif.

Adelman dan Morris, mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang salah satunya penambahan jumlah penduduk, yaitu :

- 1) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
- 2) Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
- 3) Ketidakmerataan atau disparitas pembangunan antar daerah.
- 4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga presentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.

- 5) Rendahnya mobilitas sosial.
- 6) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
- 7) Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara sedang berkembang.
- 8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan dan industri rumah tangga (Huda, 2020)

Menurut Syafrizal 2006, yang membahas disparitas ekonomi pada wilayah atau regional menyatakan disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Perbedaan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada suatu daerah. Daerah yang memiliki kandungan SDA lebih banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya yang relatif lebih rendah. Kondisi tersebut akan berdampak pada PDRB per kapita yang berbeda antar daerah. PDRB per kapita daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih banyak akan tinggi dan begitupun sebaliknya.

- 2) Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis yang dimaksud meliputi perbedaan pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan tingkah laku kebiasaan serta etos kerja masyarakat suatu daerah. Kondisi demografis yang berbeda dapat mendorong disparitas antar daerah karena hal tersebut berkaitan dengan produktivitas kerja masyarakat daerah tersebut. Daerah yang memiliki daerah demografis yang baik akan cenderung diikuti dengan produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga akan mendorong peningkatan investasi. Selanjutnya halnitu akan

berdampak pada peningkatan penyediaan lapangan kerja dan PDRB per kapita daerah tersebut.

3) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang direncanakan pemerintah atau migrasi spontan. Jika mobilitas barang kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak bisa dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Hal ini juga berlaku pada migrasi, migrasi yang kurang lancar akan berdampak pada kelebihan tenaga kerja di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa tersebut menyebabkan disparitas karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, akibatnya daerah terbelakang akan kesulitan dalam mendorong kegiatan perekonomiannya. Negara berkembang cenderung memiliki disparitas yang tinggi karena kurangnya mobilitas barang dan jasa akibat fasilitas transportasi dan komunikasi yang masih terbatas.

4) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu, perbedaan sumber daya alam, fasilitas transportasi (darat, laut, dan udara) dan kondisi demografis. Daerah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi lebih tinggi akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sehingga mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

5) Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Daerah yang mendapatkan alokasi lebih besar dari pemerintah akan menarik lebih banyak investor swasta ke daerah tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat. Kondisi tersebut juga akan menyebabkan tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi (Zasriati,

2022).

d. **Teori Disparitas Pendapatan**

Beberapa teori pengangguran antara lain:

1) Teori Todaro Smith

Menurut Todaro Smith, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima individu atau kelompok dari berbagai sumber termasuk gaji, investasi, dan bisnis. Meskipun beberapa negara berkembang mengalami pertumbuhan, banyak yang masih berjuang untuk mencapai tingkat pendapatan yang setara dengan negara maju. Namun, kesenjangan pendapatan merujuk pada perbedaan signifikan antara pendapatan kelompok terkaya dan kelompok termiskin dalam masyarakat. Fenomena ini semakin mencolok terutama antara negara kaya dan miskin. Misalnya, rasio pendapatan antara 20% penduduk dunia terkaya dan 20% termiskin meningkat dari 30:1 pada tahun 1960 menjadi 70:1 pada tahun 2000, menunjukkan bahwa ketidakadilan ekonomi semakin dalam dan berdampak negatif pada stabilitas sosial. Distribusi pendapatan menggambarkan cara pendapatan dan kekayaan tersebar di antara individu atau kelompok dalam suatu negara. Di negara-negara berkembang kesenjangan pendapatan tidak hanya terjadi antara negara tetapi juga di dalam negara itu sendiri di mana kelompok kaya menguasai sebagian besar kekayaan (Todaro, 2020).

2) Teori Ketergantungan Neokolonial

Teori ketergantungan neokolonial menjelaskan disparitas pendapatan sebagai hasil dari hubungan tidak seimbang antara negara-negara kaya dan miskin dalam sistem kapitalis internasional. Berakar pada pemikiran Marxis, teori ini menunjukkan bahwa negara-negara terbelakang terjebak dalam ketergantungan yang diciptakan oleh praktik eksploitatif negara-negara maju di mana kelompok elit di negara berkembang berkolusi dengan kekuatan internasional untuk mempertahankan status quo yang

menguntungkan mereka. Hal ini mengakibatkan kemiskinan yang terus berlanjut, di mana sebagian kecil populasi menikmati kekayaan yang melimpah sementara mayoritas tetap hidup dalam keterbelakangan. Pandangan Paus Yohanes Paulus II juga menegaskan bahwa mekanisme ekonomi yang ada sering melanggengkan ketidakadilan sehingga diperlukan restrukturisasi sistem global untuk membebaskan negara-negara berkembang dari ketergantungan yang merugikan (Todaro, 2020).

3) Teori Model Pradigma Palsu

Teori model paradigma palsu menjelaskan disparitas pendapatan di negara-negara Dunia sebagai hasil dari saran dan kebijakan yang tidak tepat dari para pakar internasional yang sering kali didasarkan pada perspektif budaya dan konteks yang tidak relevan. Meskipun saran-saran tersebut tampak baik, mereka sering kali gagal memahami faktor-faktor kelembagaan lokal, seperti struktur sosial tradisional dan distribusi kekayaan yang tidak merata, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak efektif. Elit lokal, yang terdidik di institusi luar negeri, sering kali mengadopsi konsep-konsep asing yang tidak sesuai, mengabaikan kebutuhan reformasi yang mendasar di negara mereka. Akibatnya, upaya pembangunan menjadi terhambat, dan disparitas pendapatan semakin melebar karena kebijakan yang tidak mempertimbangkan realitas dan tantangan lokal. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman konteks lokal dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil (Todaro, 2020)

2. Jumlah Penduduk

a. Definisi

Jumlah penduduk merupakan jumlah total dari seseorang atau sekelompok orang yang menempati satu daerah/wilayah yang sama. Penduduk didefinisikan sebagai seseorang/individu yang menempati suatu daerah dengan jangka waktu yang lama. Penduduk tersebut

biasanya menempati daerah/wilayah tersebut untuk menjalani hidup selama hidupnya. Biasanya seseorang yang dianggap penduduk di daerah/wilayah tersebut adalah seseorang yang KTP atau Kartu Tanda Penduduknya 43 berasal dari daerah tersebut. Menurut BPS, penduduk merupakan orang yang berdomosili di wilayah Indonesia selama 6 bulan atau lebih serta mereka tinggal di wilayah Indonesia selama 6 bulan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, 2020).

Penduduk memiliki fungsi ganda dalam perekonomian. Dalam literatur kuno, pada umumnya penduduk dianggap sebagai penghambat pembangunan. Keberadaannya yang dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Artinya, jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Sedangkan dalam literatur modern, penduduk justru dipandang sebagai pemacu pembangunan. Berlangsungnya kegiatan produksi adalah berkat adanya orang-orang yang membeli dan mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Peningkatan 28 konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan.

Setiap tahunnya jumlah penduduk mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan adanya perubahan jumlah penduduk di suatu daerah/wilayah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di setiap daerah memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, meskipun dengan luas yang sama belum tentu daerah yang berdekatan dapat memiliki jumlah penduduk yang sama.

Menurut Ricardo dalam Jhingan, pertumbuhan penduduk pada suatu saat akan mengakibatkan keadaan yang disebut dengan *stationary state* yaitu saat dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Selain itu perekonomian akan terus menurun sampai dengan tingkat yang lebih rendah dimana upah buruh sangat minimal hanya cukup untuk hidup (*subsistence level*). Ricardo melihat pertumbuhan

penduduk dan kemerosotan pertumbuhan modal sebagai akibat bekerjanya *The Law of Diminishing Return* sebagai penghalang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, teori Neo Klasik menganggap penduduk memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap pembangunan karena:

- 1) Perkembangannya akan memperluas pasar;
- 2) Perbaikan dalam kemahiran dan mutunya dapat menciptakan berbagai akibat yang positif terhadap pembangunan; dan
- 3) Penduduk menyediakan pengusaha yang inovatif yang akan menjadi unsur penting dalam menciptakan pembentukan modal..

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat pada disparitas distribusi pendapatan (Rahmadi, 2021).

b. Teori Jumlah Penduduk

Beberapa teori jumlah penduduk antara lain:

- 1) Teori jebakan populasi Malthus

Teori jebakan populasi Malthus, yang dikemukakan oleh Thomas Malthus, menjelaskan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi dengan mengemukakan bahwa populasi akan meningkat secara geometrik, sedangkan sumber daya pangan hanya dapat meningkat secara aritmetik. Akibatnya, ketika jumlah penduduk melebihi kapasitas produksi pangan, pendapatan per kapita akan menurun hingga mencapai tingkat subsisten, di mana sebagian besar populasi hidup dalam kemiskinan. Malthus berargumen bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pengendalian kelahiran atau "penanaman kesadaran moral". Teori ini juga membahas konsep ekuilibrium, di mana pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dari

pertumbuhan pendapatan akan menyebabkan penurunan pendapatan per kapita, dan sebaliknya, menciptakan titik ekuilibrium yang stabil dan tidak stabil. Pendukung aliran neo-Malthus berpendapat bahwa tanpa pengendalian populasi, negara-negara miskin tidak akan mampu meningkatkan pendapatan perkapita mereka secara signifikan, dan akan menghadapi pengendalian positif seperti kelaparan dan penyakit sebagai konsekuensi dari ledakan populasi (Todaro, 2020).

2) Teori Pertumbuhan Penduduk Perlu

Aliran argumen konvensional berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah masalah, melainkan elemen kunci yang mendorong pembangunan ekonomi, dengan populasi yang lebih besar menciptakan pasar untuk barang dan jasa, serta memungkinkan skala ekonomis yang menurunkan biaya produksi. Para ekonom populasi "*revisionis*" percaya bahwa pasar bebas dapat mengatasi kelangkaan sumber daya yang ditimbulkan oleh tekanan populasi, dengan harga yang mendorong inovasi teknologi. Mereka menyoroti bahwa banyak daerah di negara berkembang, terutama di Afrika dan Amerika Latin, mengalami kekurangan penduduk, sehingga potensi produksi tanah subur yang belum dimanfaatkan masih sangat besar. Selain argumen ekonomi, terdapat juga aspek nonekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk diperlukan untuk mempertahankan perbatasan, melindungi preferensi etnis, dan meningkatkan kekuatan politik dan militer. Dengan demikian, argumen ini menantang pandangan ortodoks yang menganggap pertumbuhan penduduk sebagai ancaman, dan memberikan landasan bagi kebijakan yang pro-pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang (Todaro, 2020).

3) Pertumbuhan Penduduk Adalah Masalah Sebenarnya

Pendukung pembatasan pertumbuhan jumlah penduduk berargumen bahwa laju pertumbuhan yang cepat menyebabkan

konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang serius, menjadikannya masalah yang harus ditangani. Argumentasi garis keras mengaitkan pertumbuhan penduduk dengan berbagai krisis global, termasuk kemiskinan, kesehatan buruk, dan degradasi lingkungan. Sementara itu, teori siklus populasi-kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat mengurangi tabungan dan investasi memperburuk kondisi ekonomi dan menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Dalam hal ini keluarga miskin merasa perlu memiliki lebih banyak anak sebagai sumber tenaga kerja yang pada gilirannya memperparah ketergantungan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan neoklasik, seperti yang dijelaskan dalam persamaan $y=f(K,L,R,T)$, menunjukkan bahwa tanpa peningkatan teknologi, pertumbuhan penduduk yang tinggi memerlukan peningkatan modal yang tidak mungkin tercapai sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan program keluarga berencana dianggap penting untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup (Todaro, 2020).

c. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Disparitas Pendapatan

Teori neoklasik mikroekonomi fertilitas rumah tangga menjelaskan bahwa keputusan mengenai jumlah anak yang diinginkan oleh keluarga merupakan pilihan ekonomi rasional yang dipengaruhi oleh pendapatan, biaya pemeliharaan anak, dan preferensi terhadap barang lain. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai barang konsumsi, di mana permintaan akan anak (C_a) meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan (Y) dan menurun saat biaya pemeliharaan anak ($P_{\{c\}}$) relatif tinggi. Teori perilaku konsumen konvensional mendukung pandangan ini, dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin besar permintaan anak, sementara peningkatan biaya pemeliharaan anak akan mengurangi jumlah anak yang

diinginkan. Selain itu, kesempatan kerja bagi wanita dan kebijakan pajak terhadap jumlah anak dapat mempengaruhi keputusan ini, mendorong keluarga untuk memilih memiliki lebih sedikit anak demi meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, teori ini memberikan wawasan tentang hubungan antara pembangunan ekonomi atau bisa dikaitkan dengan kesejahteraan maupun disparitas pendapatan dan pertumbuhan penduduk yang penting dalam pengambilan kebijakan (Todaro, 2020).

Menurut argumen empiris Todaro dan Smith terdapat tujuh konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk yang pesat, yakni salah satunya kemiskinan kemudian setelahnya disparitas. Dalam penjelasan ini jumlah penduduk yang pesat tersebut memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penduduk miskin terutama yang paling miskin. Sedangkan 'penduduk yang paling miskin' dalam penjelasan tersebut dapat menggambarkan disparitas antar pendapatan si kaya dan si miskin diantara jumlah penduduk. Kelompok penduduk miskin ini sering kali menjadi korban pertama dari penghematan anggaran pemerintah, yang berdampak pada pengurangan dana untuk program kesehatan dan pendidikan. Bencana alam atau kerusakan lingkungan juga paling dirasakan oleh mereka. Kaum wanita miskin yang paling rentan terjebak dalam lingkaran setan di mana kondisi mereka yang buruk menghambat keberhasilan program sosial. Dengan banyaknya anggota keluarga yang dilahirkan peningkatan jumlah penduduk dan makin bertambah kemiskinan ini akan memperburuk disparitas pendapatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk sekaligus kemiskinan yang tidak terkendali berkontribusi pada disparitas pendapatan yang semakin lebar menciptakan tantangan serius bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro, 2020)

3. Kemiskinan

a. Definisi

Pengertian kemiskinan umumnya selalu dikaitkan hanya dengan sektor ekonomi semata. Padahal kemiskinan bisa dilihat dari sisi sosial maupun budaya masyarakat. Pada prinsipnya kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut. Salah satunya adalah definisi kemiskinan yang digunakan BPS yang menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Kemensos, 2023)

Tidak mudah untuk menarik suatu batas yang cukup jelas antara penduduk miskin dan yang tidak miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memperkirakan tingkat dan jumlah penduduk miskin telah mempergunakan pendekatan pendekatan ekonomi, sebagaimana yang juga dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Dengan demikian penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang tingkat pendapatannya masih berada di bawah kebutuhan. Untuk mencapai tingkat kebutuhan minimnya inilah yang lazim disebut sebagai garis kemiskinan. yang tingkat pendapatannya masih berada dibawah garis kemiskinan inilah disebut kelompok penduduk miskin (BPS Indonesia, 2021).

Garis kemiskinan diperoleh dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per-kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum untuk perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan, dan transpor merupakan kebutuhan minimum bukan makanan yang harus dipenuhi. Tahapan penghitungan batas garis

kemiskinan dimulai dengan mengurutkan data pengeluaran yang di mulai dari nilai terendah sampai yang tertinggi. Kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kelas tertinggi. Selanjutnya, rata-rata pengeluaran per kapita untuk makan pada setiap kelas, diperoleh dengan cara membagi jumlah pengeluaran untuk makanan dengan banyaknya penduduk pada masing-masing kelas (BPS Indonesia, 2021).

b. Ciri-ciri Kemiskinan

Seluruh perkiraan tingkat kemiskinan yang dilakukan di Indonesia mempergunakan hasil BPS dan data dari Bank Dunia. Karena memang informasi tentang data ini sangat sulit didapat tingkat validitasnya. Walaupun demikian dengan informasi yang serba terbatas tersebut telah berhasil disusun usaha mengetahui ciri-ciri penduduk miskin tersebut. Ciri-ciri tersebut bahwa rumah tangga miskin pada umumnya adalah rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga banyak, yang kepala rumah tangganya merupakan pekerja rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga maupun anggotanya rendah, sering berubah pekerjaan, sebagian besar mereka yang telah bekerja masih mau menerima tambahan pekerjaan lagi bila ditawarkan, dan sebagian besar sumber pendapatan utamanya adalah sektor pertanian. Masalah kemiskinan merupakan masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Setidak-tidaknya terdapat dua masalah utama dalam pengembangan SDM.

Pertama, masih belum berkembangnya (*under development*) SDM. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan, konsumsi gizi masih rendah dan penyediaan fasilitas-fasilitas kehidupan yang layak masih belum memadai. Dengan demikian kemampuan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa masih rendah.

Kedua, masih belum dimanfaatkannya seluruh keterampilan dan kemampuan SDM secara optimal. Tidaklah begitu mengherankan apabila masih terdapat "*under utilization*" SDM di Indonesia. Hal ini sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari kondisi "*under development*"

yang terdapat dalam SDM tersebut. Kedua faktor tersebut telah mengakibatkan pula rendahnya daya kemampuan SDM untuk memiliki faktor-faktor produksi, khususnya tanah dan modal, sehingga semakin mendorong ke dalam lembah kemiskinan. Namun demikian sukar dicari kaftan yang jelas antara ciri-ciri penduduk miskin tersebut dengan tingkat kemiskinan itu sendiri, misalnya tingkat pendidikan rendah karena berada dalam keadaan miskin. Hal yang sama terlihat dalam masalah kesehatan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Ciri-ciri kemiskinan telah mengalami perubahan pula dari masa ke masa. Mengingat konsep kemiskinan ini lebih bersifat relatif daripada absolut, maka kemiskinan tersebut akan selalu terdapat dalam setiap negara. Namun demikian pengertian kemiskinan tersebut akan mengalami perubahan pula sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kehidupan bangsa di masa mendatang.

c. **Masalah Kemiskinan**

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinan yaitu :

- 1) Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.
- 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan

- pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.
- 3) Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi .
 - 4) Kemiskinan konsekuensial. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan fenomena sosiologis yang menjadi atribut negara-negara Dunia Ketiga. Fenomena ini juga merupakan kebalikan dan kondisi yang dialami oleh negara-negara maju yang memiliki atribut sebagai "maju atau model". Untuk memahami definisi dan asal mula kemiskinan dan keterbelakangan, kita dapat melakukan kajian dengan cara mengadakan telaahan terhadap kemiskinan dan kosakata kemiskinan seperti yang dilakukan oleh Friedman dan Korten.

Membandingkan dengan konsep-konsep modernisasi sebagai kebalikan yang diametral dari kemiskinan dan keterbelakangan seperti yang dikemukakan oleh para pakar yang terkumpul dalam antologi "*Modernization The Dynamics of Growth*".

Hampir di setiap negara, kemiskinan selalu terpusat di tempat-tempat tertentu, yaitu biasanya di perdesaan atau di daerah-daerah yang kekurangan sumber daya. Persoalan kemiskinan juga selalu berkaitan dengan masalah masalah lain, misalnya lingkungan. Beban kemiskinan

paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, mereka sering merupakan pihak yang menanggung beban kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak, mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan tersebut dan kualitas hidup masa depan mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi pemerataan kesehatan dan pendidikan. Selain itu timbulnya kemiskinan sangat sering terjadi pada kelompok-kelompok minoritas tertentu. Kemiskinan berbeda dengan disparitas distribusi pendapatan (inequality). Perbedaan ini sangat perlu ditekankan. Kemiskinan berkaitan erat dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu. Sedangkan disparitas mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat disparitas yang maksimum kekayaan dimiliki oleh satu orang saja dan tingkat kemiskinan sangat tinggi.

d. **Indikator dan perhitungan kemiskinan**

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam aplikasinya dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Penghitungan penduduk miskin dengan pendekatan makro didasarkan pada data sampel bukan data sensus, sehingga hasilnya adalah estimasi (perkiraan). Sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang pencacahannya dilakukan setiap bulan Maret dengan jumlah sampel 68.000 rumah tangga. BPS menyajikan data kemiskinan makro sejak tahun 1984 sehingga perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin bisa diikuti dari waktu ke waktu.

Data kemiskinan makro hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi. Data ini berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis namun tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin (sasaran) sehingga tidak operasional untuk program penyaluran bantuan langsung dan perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT), raskin, dan Jamkesmas. Untuk penyaluran bantuan langsung yang memerlukan nama dan alamat target dibutuhkan data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus, bukan sampel. Berbeda dengan metode penghitungan kemiskinan makro yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, pengumpulan data kemiskinan mikro didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin supaya pendataan bisa dilakukan secara cepat dan hemat biaya.

Penghitungan Indikator Kemiskinan Provinsi Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu harga rata-rata kalori dari ke 52 komoditi tersebut. Selanjutnya harga implisit rata-rata kalori tersebut dikalikan dengan 2100. GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/

sub-kelompok yang tercatat dalam data susenas konsumsi pengeluaran. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004). SPKKD 2004 dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas konsumsi pengeluaran. GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selanjutnya dihitung indikator kemiskinan tingkat provinsi

Penghitungan indikator kemiskinan kabupaten/kota dalam menghitung *gk* pada level kabupaten/kota tidak dapat dilakukan <https://www.bps.go.id> seperti pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Hal ini disebabkan oleh 4 data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2024 keterbatasan jumlah sampel untuk populasi referensi di level kabupaten/kota. Estimasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan berdasarkan perkotaan dan perdesaan. Pendekatan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1. Menentukan garis kemiskinan sementara (*gks*) untuk tingkat kabupaten/kota dengan cara;

$$GKS_{ij}^t = GK_{ij}^{t-1} \times (1 + (E_j \times I_{ij}))$$

Dimana:

GKS_{ij}^t = Garis Kemiskinan Sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j di tahun t

GK_{ij}^{t-1} = Garis kemiskinan kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j di tahun t-1

E_j = Elastisitas provinsi ke-j (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke-j terhadap inflasi provinsi ke-j)

I_{ij} = Inflasi kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j

e. Pembagian kemiskinan

Dimensi Kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan (Harniati, 2010), yaitu :

- 1) Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanam lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menyebabkan hasil produksi hanya dapat diperoleh sekali dalam satu tahun.
- 2) Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga semakin lama menjadi semakin sempit.
- 3) Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu

dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun

f. **Teori Kemiskinan**

Suparlan (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Lebih jauh lagi, kemiskinan berarti suatu kondisi di mana orang atau kelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang, serta sangat rentan (*vulnerable*) terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah (Rosana, 2020).

World Bank mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain dari karakteristik faktor komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industri (World Bank, 2022).

Analisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan atau determinan kemiskinan pernah dilakukan oleh Ikhsan. Ikhsan, membagi faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi empat kelompok, yaitu modal sumber daya manusia (*human capital*), modal fisik produktif

(*physical productive capital*), status pekerjaan, dan karakteristik desa. Modal SDM dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini, indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Secara umum semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. (Ikhsan, 1999)

g. **Hubungan antara Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan**

Lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), atau dengan singkat perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini terutama dikaitkan kepada nama Nurkse, seorang ahli ekonomi yang merintis penelaahan mengenai masalah pembentukan modal di negara berkembang

Menurut argumen empiris Todaro dan Smith terdapat tujuh konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk yang pesat, yakni salah satunya kemiskinan kemudian setelahnya disparitas. Dalam penjelasan ini jumlah penduduk yang pesat tersebut memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penduduk miskin terutama yang paling miskin. Sedangkan ‘penduduk yang paling miskin’ dalam penjelasan tersebut dapat menggambarkan disparitas antar pendapatan si kaya dan si miskin diantara jumlah penduduk.

Kelompok penduduk miskin ini sering kali menjadi korban pertama dari penghematan anggaran pemerintah, yang berdampak pada pengurangan dana untuk program kesehatan dan pendidikan. Bencana alam atau kerusakan lingkungan juga paling dirasakan oleh mereka. Kaum wanita miskin yang paling rentan terjebak dalam lingkaran setan

di mana kondisi mereka yang buruk menghambat keberhasilan program sosial. Dengan banyaknya anggota keluarga yang dilahirkan peningkatan jumlah penduduk dan makin bertambah kemiskinan ini akan memperburuk disparitas pendapatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk sekaligus kemiskinan yang tidak terkendali berkontribusi pada disparitas pendapatan yang semakin lebar menciptakan tantangan serius bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro, 2020)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Agam Firdaus, pada 2023 judulnya “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali” dalam penelitian mereka terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pendapatan di suatu daerah, salah satu contohnya adalah disparitas terjadi karena adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan yaitu indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model ekonometrik (*estimator*). Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah model REM (*random effect model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pendapatan di Provinsi Bali dipengaruhi oleh variabel tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten, dan jumlah penduduk. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu seluruh variable X1 dan Y yaitu jumlah penduduk dan disparitas pendapatan dimana pada penelitian ini hanya jumlah penduduk yang. Persamaan lain yaitu sama sama menggunakan data panel dari kabupaten/kota di provinsi namun pada penelitian ini lokasi yang diteliti Provinsi Bali. Perbedaan dengan penelitian

penulis adalah mereka menggunakan variabel lainnya seperti pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah minimum, kemudian tempat penelitian tentunya yaitu mereka melakukan di Bali (Agam Firdaus, 2023).

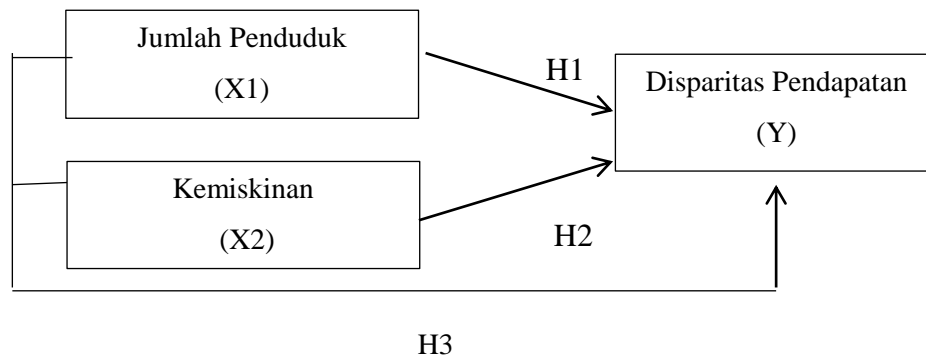
Penelitian ini dilakukan oleh Ady Soetejo “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif. Variabel dalam penelitian ini adalah pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan — sumber data dari BPS dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan cross-section 34 provinsi dan time series untuk tahun 2015-2018. Hasil penelitian diperoleh model efek acak, model terbaik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pendidikan dan kemiskinan berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sementara pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Secara simultan, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Namun, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan hanya dapat menjelaskan 22,37% pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel X_2 dan Y yaitu kemiskinan dan disparitas pendapatan, namun belum ada variabel X_1 jumlah penduduk. Perbedaan lain yaitu menggunakan lokasi Indonesia dan cross-section 34 provinsi serta time series 3 tahun (Hindun, 2019).

Penelitian yang dilakukan Frisnory dkk (2024) “Analisis Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada Tahun 2023” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung jumlah kemiskinan di Indonesia pada Tahun 2023 terhadap Ketimpangan Pendapatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan pada dasarnya adalah kondisi Dimana seseorang atau penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. akibat dari kemiskinan maka kesejahteraan penduduk sangat sukar untuk dicapai (Kembaren 2021). Adapun masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan Pembangunan ekonomi perlu adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variable X2 dan Y yaitu kemiskinan dan disparitas pendapatan, perbedaannya lokasi lebih luas yaitu indonesia, belum ada variable X1 jumlah penduduk (Frisnoiry et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan pada Irvan Roy Kpp 2024) “Faktor Penentu Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Kota Sumatera Barat.” Dalam penelitian mereka disimpulkan semakin besar perbedaan pendapatan semakin besar pula variasi dalam disparitas pendapatan. Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari seluruh variabel independen untuk memberikan variasi kontribusi dalam mempengaruhi variabel dependen yang diukur dengan persentase. Berdasarkan hasil estimasi persamaan regresi dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.563632. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 56,3% kontribusi naik turunnya variabel Disparitas pendapatan di Sumatra Barat mampu dijelaskan oleh PDRB, Tingkat Pengangguran, Jumlah kemiskinan, IPM. Sedangkan sisanya 43,7% di pengaruhi oleh variabel lain di luar model. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variable X2 dan Y yaitu kemiskinan dan disparitas pendapatan, lokasi penelitian, namun belum ada variable X1 jumlah penduduk (Jonardi & Harahap, 2024).

C. Kerangka Penelitian



H3
Gambar 2. 2
Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. H0 1: diduga variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi sumatera barat tahun 2020-2024.
 Ha 1: diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi sumatera barat tahun 2020-2024.
2. H0 2: diduga variabel kemiskinan tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi sumatera barat tahun 2020-2024.
 Ha 2: diduga variabel kemiskinan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi sumatera barat tahun 2020-2024.
3. H0 3: diduga variabel pengaruh jumlah penduduk dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi sumatera barat tahun 2020-2024.
 Ha 3: diduga variabel jumlah penduduk dan kemiskinan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi sumatera barat tahun 2020-2024.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Maksud dari jenis penelitian asosiatif ini yaitu dilakukan dengan menghubungkan pengaruh antar dua variable atau lebih yang tidak mengesampingkan sebab akibat dan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang bekerja dengan data numerik atau angka yang datanya berwujud bilangan dengan menggunakan analisis statistik (Abdullah, Karimuddin, 2022).

Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif yang mengetahui pengaruh jumlah penduduk (X1) dan kemiskinan (X2) terhadap disparitas pendapatan (Y) di kabupaten & kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.

B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini di lakukan di wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 - 2024 yang terdiri dari 7 Kota dan 12 Kabupaten.

**Tabel 3. 1
Waktu Penelitian**

| Uraian Kegiatan | Tahun 2025 | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| Penyusunan Proposal | | | | | | | |
| Pembuatan Proposal | | | | | | | |
| Bimbingan Proposal | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | | | |
| Bimbingan Setelah Seminar | | | | | | | |
| Penelitian | | | | | | | |
| Bimbingan Skripsi | | | | | | | |
| Munafasah | | | | | | | |

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang mana data ini penulis kumpulkan melalui website bps.go.id lebih tepatnya BPS Sumatera Barat dan selanjutnya penulis kumpulkan data yang berkaitan dengan variable penelitian. Dalam hal ini penulis kumpulkan yaitunya data jumlah penduduk, kemiskinan, dan disparitas pendapatan (gini ratio) dengan jenis cross section jumlah kabupaten dan kota kemudian time series 5 tahun dari 2020 sampai 2024.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh beberapa yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu laporan, Teknik dokumentasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, serta juga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dalam pembuktian suatu kejadian. Dalam hal ini penulis kumpulkan yaitunya laporan data berbentuk tabel statistik berdasar kabupaten dan kota pada BPS Sumatera Barat untuk setiap variable terkait.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu regresi data panel dengan jumlah cross section 19 kabupaten dan kota dan time series 5 tahun menggunakan alat bantu Eviews 12. Alat analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif estimasi model data panel, kemudian uji pemilihan model data panel, uji asumsi klasik dan hipotesis.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik deskriptif meliputi penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, mean, median (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui

perhitungan rata-rata dan standar deviasi ataupun perhitungan persentase. Statistik deskriptif menjelaskan nilai rata-rata (mean) dari data, standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa data yang berkaitan bervariasi dengan rata-rata, kemudian nilai minimum yaitu nilai terkecil dari data yang diteliti, dan nilai maksimum yaitu nilai terbesar yang diteliti. Statistik deskriptif menjadi awal dari penelitian agar dapat melihat penyebaran data yang akan diolah dengan uji-uji yang lain.

2. Estimasi Model Regresi Data Panel

Adapun penentu model estimate dalam model regresi yaitu dengan menggunakan data panel yang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain (Basuki, 2021)

a. Common Effect

Common Effect merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat kecil untuk mengestimasi model dan panel.

b. Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. Model fixed effect adalah teknik estimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk mendeteksi perbedaan intersep. Intercept antar perusahaan, perbedaan intersep dapat muncul karena perbedaan budaya kerja, manajemen dan perawatan intensif. Selain itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi ditetapkan antara perusahaan dan waktu.

c. Random Effect Model (REM)

Model ini memperkirakan data panel di mana variabel gangguan mungkin terkait dari waktu ke waktu dan antar individu. Dalam model efek acak, perbedaan intersep diperhitungkan oleh kondisi kesalahan

masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model efek acak adalah bahwa heteroskedastisitas dihilangkan. Model ini juga dikenal dengan teknologi GLS (Generalized Least Square).

3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menganalisis data panel, perlu dilakukan pengujian spesifikasi model yang benar untuk mendeskripsikan data mana yang paling baik dan paling cocok, untuk memilih model mana yang paling cocok maka akan dilakukan pengujian, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman dan uji LM jika hasil antar dua uji diatas berbeda. (Cakra & Yasin, 2020). Adapun uji yang dimaksud yaitu:

a. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk menentukan model yang akan digunakan Pooled Least Squares atau fixed effect. Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan Uji Chow yaitu:

- 1) $H_0 =$ jika $\text{prob} > 0.05$, maka menggunakan model Pool atau common Effect..
- 2) $H_a =$ jika $\text{prob} < 0.05$, maka menggunakan Fixed Effect.

Hipotesis nol pada uji ini adalah bahwa intersep sama atau dengan kata lain. Model yang benar untuk regresi data panel adalah efek umum, dan hipotesis alternatifnya adalah bahwa intersep tidak sama atau model yang benar untuk regresi data panel adalah efek tetap.

Nilai statistik F mengikuti statistik F dengan derajat kebebasan penunjuk. M adalah jumlah batasan atau batasan dalam model tanpa variabel dummy. Jumlah batasan adalah jumlah orang dikurangi satu. N adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah parameter dengan efek tetap.

Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikalikan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter pada model fixed effect (k) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Jika nilai F hitung lebih besar dari F kritis, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti model regresi data panel yang benar adalah model efek tetap. Sebaliknya jika

nilai F' hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nol diterima, yang berarti model regresi data panel yang benar adalah model efek umum.

b. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk menentukan model yang akan digunakan Random Effect atau Fixed Effect. Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan uji Chow:

- 1) H_0 = jika $prob > 0.05$, maka menggunakan model Random Effect.
- 2) H_a = jika $prob < 0.05$, maka menggunakan Fixed Effect. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Square dengan derajat Freedom (df) sama dengan jumlah variabel independent.

Hipotesis nol adalah model yang benar untuk regresi data panel adalah model efek acak, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang benar untuk regresi data panel adalah model efek tetap. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Square maka hipotesis nol ditolak, artinya model regresi data panel yang benar adalah model fixed-effect. Sebaliknya jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis Chi-Square maka hipotesis nol diterima yang berarti model yang sesuai untuk regresi data adalah model random effect.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan model pendekatan Common Effect Model (CEM) lebih baik dari Random Effect Model (REM) dalam mengestimasi data panel. Random Effect Model dikembangkan oleh Breusch-Pagan yang digunakan untuk menguji signifikansi yang didasarkan pada nilai residual dari metode OLS.

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai cross section Breusch-Pagan $>$ nilai signifikan 0.05 maka H_0 diterima, sehingga Common Effect Model (CEM) adalah yang paling tepat untuk digunakan.
- 2) Jika nilai cross section Breusch-Pagan $<$ signifikan 0.05 maka H_0 ditolak, sehingga Random Effect Model (REM) adalah yang paling

tepat untuk digunakan.

Hipotesis yang digunakan adalah:

- 1) H_0 = Common Effect Model (CEM)
- 2) H_a = Random Effect Model (REM)

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk menguji kelayakan model regresi. Penggunaan uji asumsi klasik adalah untuk menentukan bagaimana variabel bebas Jumlah Penduduk dan Kemiskinan (X) mempengaruhi variabel terikat Disparitas Pendapatan (Y) (Nani, 2022). Ada empat dalam pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas yaitu:

a. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah ketika residual untuk pengamatan satu dengan yang lain berkorelasi menurut runtut waktu. Tidak ada masalah autokorelasi, menurut model regresi yang baik. Dalam suatu model, pengujian autokorelasi dilakukan untuk menentukan ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e_i) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (e_{t-1}). Pengujian ini dilakukan pada sampel data seri waktu, di mana n adalah periode waktu. Uji Durbin-Watson dan Run Test adalah dua contoh uji statistik yang sering digunakan.

b. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Jika ada, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya terganggu. Selain itu, tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menghindari kebiasaan dalam mengambil kesimpulan mengenai pengaruh uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Toleransi dengan batas

minimal sebesar 0,10 atau Variance Inflation Factor (VIF) maksimal 10 adalah nilai cut off yang biasa digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah ada ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam model regresi yang mempengaruhi persyaratan, kesamaan varians antara residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, yang dikenal sebagai homoskedastisitas. Dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dan SRESID (nilai residualnya) dapat mengidentifikasi homoskedastisitas dengan menggunakan metode plot dispersi. Jika grafik tidak menunjukkan pola tertentu, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit, maka model yang baik akan dihasilkan. Uji Glejser, Park, dan White adalah uji statistik yang dapat digunakan, dan uji Spearman dapat digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas. Jika masing-masing variabel memiliki signifikansi 0,05 maka model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas (Nani, 2022).

5. Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan dua data time series dan cross section. Secara teknis data panel dapat memberikan data yang informatif, mengurangi kolinearitas antar perubahan, serta meningkatkan efisiensi (Tri Basuki, 2021). Dalam penelitian ini, analisis regresi digunakan untuk mengetahui apa pengaruh Jumlah Penduduk (X1), Kemiskinan (X2) terhadap Disparitas Pendapatan (Y) dihitung dengan menggunakan rumus persamaan garis regresi data berganda sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + e$$

Keterangan:

Y = Disparitas Pendapatan

X1 = Jumlah Penduduk

X₂ = Kemiskinan

A = Konstanta

$\beta_1\beta_2$ = Koefisien

i = Jumlah

t = Waktu

e = Error

6. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji hipotesis yang dilakukan dengan cara uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji signifikansi koefisien variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Pengujian ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas.

H₀ = Jika variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

H_a = Jika variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Penolakan dan penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$) atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($Prob < 0,05$), yang berarti H₀ ditolak dan H_a diterima, maka secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika t hitung lebih kecil dari t tabel ($t_{hitung} < t_{tabel}$) atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($Prob > 0,05$), yang berarti H₀ diterima, maka secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas.

H_0 = Jika semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

H_a = Jika semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Penolakan dan penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika f hitung lebih besar dari f tabel (f hitung $>$ f tabel) atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($\text{Prob} < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, maka simultan (bersama-sama) semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika f hitung lebih kecil dari f tabel (f hitung $<$ f tabel) atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($\text{Prob} > 0,05$), yang berarti H_0 diterima, maka secara simultan (bersama-sama) semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Untuk itu pengujian hipotesis yang digunakan adalah: Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 berbanding 1.

Semakin dekat koefisien determinasi (R^2) dari suatu persamaan regresi ke 1, maka semakin besar pengaruh semua pengaruh independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan untuk menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya, semakin dekat koefisien determinasi atau persamaan regresi ke 0, maka semakin kecil pengaruh ketergantungan terhadap nilai variabel independen (semakin kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis Wilayah

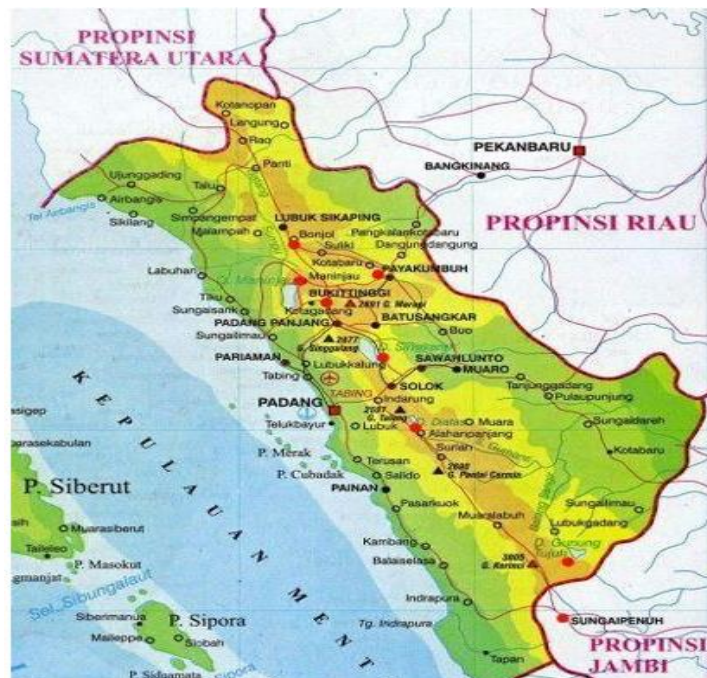
Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang dikenal dengan julukan "Ranah Minang" dengan luas wilayah 42.119,54 km² atau 16.262,45 mil persegi. Wilayah ini mencakup daratan serta perairan dengan karakteristik geografis yang bervariasi, termasuk dataran tinggi, lembah, pantai serta gugusan pulau-pulau kecil dilepas pantainya. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat berada di antara 98°36'–101°53' Bujur Timur dan 0°54' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan. Wilayah ini mencakup daratan seluas sekitar 42.297,30 km² dan perairan laut seluas kurang lebih 186.580 km², dengan panjang garis pantai daratan sekitar 375 km. Jika ditambah dengan garis pantai Kepulauan Mentawai sepanjang 1.003 km, total panjang garis pantai mencapai 1.378 km. Perairan laut di wilayah ini mencakup 375 pulau besar dan kecil (pemprov).

Ibu kota Sumatera Barat terletak di Kota Padang. Secara administratif, Sumatera Barat terdiri atas 19 kabupaten/kota, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, dengan total 179 kecamatan dan 1.160 kelurahan atau nagari. Batas-batas wilayahnya meliputi; sebelah utara berbatasan dengan 40 Provinsi Sumatera Utara, sebelah timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, serta sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Detailnya berdasarkan letak geografis Provinsi Sumatera Barat berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara batas ini meliputi wilayah daratan yang terdiri dari daerah pegunungan dan hutan.

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan sedikit bagian dengan Provinsi Jambi. Di bagian timur ini, Sumatera Barat memiliki banyak hutan tropis dan beberapa Sungai besar.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sebagian Jambi. Di Selatan, terdapat daerah dataran rendah dan Sebagian Kawasan hutan serta perbukitan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Pantai barat Sumatera Barat memanjang dari utara ke selatan, dan terdapat pulau-pulau kecil yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi, seperti Kepulauan Mentawai.

Selain batas daratan, Sumatera Barat juga memiliki Kawasan laut yang mencakup beberapa pulau kecil, seperti Pulau Mentawai yang merupakan bagian dari wilayah administrasi provinsi ini. Luas wilayah Sumatera Barat dan batas batas administratifnya memiliki dampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di Provinsi ini.



Gambar 4.1
Peta Provinsi Sumatera Barat
 Sumber; Pemprov sumbar

2. Kondisi Demografis Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat pada lima tahun terakhir mengalami kenaikan signifikan yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Terakhir jumlah penduduk dengan total penduduk provinsi mencapai 5.836.200 jiwa. Kenaikan ini juga terlihat di seluruh kabupaten dan kota yakni tidak adanya angka tetap atau menurun melainkan selalu bertambah padatnya penduduk di daerah tersebut. Kabupaten Pesisir Selatan mencatat jumlah penduduk tertinggi dengan 532.910 jiwa, sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki jumlah terendah, yaitu 92.760 jiwa. Di sisi kota, Kota Padang sebagai kota dengan penduduk tertinggi mencapai 954.180 jiwa, sedangkan Kota Solok mencatat 79.460 jiwa. Meskipun Provinsi Sumatera Barat memiliki populasi yang besar, terdapat disparitas yang signifikan dalam jumlah penduduk antar kabupaten dan kota, mencerminkan peran penting provinsi ini sebagai pusat sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Berikut tabel data jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut kabupaten kota:

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk di Kabupaten & Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

| No | Kabupaten & Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab.Kep.Mentawai | 87623 | 88389 | 89401 | 91430 | 92760 |
| 2 | Kab.Pesisir Selatan | 504418 | 509618 | 516518 | 525360 | 532910 |
| 3 | Kab.Solok | 391497 | 394237 | 397829 | 405380 | 410430 |
| 4 | Kab.Sijunjung | 235045 | 237313 | 240317 | 243710 | 246780 |
| 5 | Kab.Tanah Datar | 371704 | 373693 | 376276 | 383680 | 388230 |
| 6 | Kab.Padang Pariaman | 430626 | 433018 | 436129 | 451390 | 459170 |
| 7 | Kab.Agam | 529138 | 534202 | 540905 | 551890 | 55930 |
| 8 | Kab.Lima Puluh Kota | 383525 | 385634 | 388375 | 396430 | 401090 |
| 9 | Kab.Pasaman | 299851 | 303103 | 307425 | 31320 | 318080 |
| 10 | Kab.Solok Selatan | 182027 | 184854 | 188649 | 191540 | 195030 |
| 11 | Kab.Dharmasraya | 228591 | 231217 | 234713 | 239920 | 244030 |
| 12 | Kab.Pasaman Barat | 431672 | 436313 | 442479 | 450050 | 456470 |
| 13 | Kota Padang | 909040 | 913448 | 919145 | 942940 | 954180 |
| 14 | Kota Solok | 73438 | 74469 | 75850 | 77840 | 79460 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 65138 | 65687 | 66413 | 67760 | 68730 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 56311 | 56971 | 57850 | 58630 | 59450 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 121028 | 121588 | 122311 | 124050 | 125020 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 139576 | 141184 | 143325 | 144830 | 146730 |
| 19 | Kota Pariaman | 94224 | 95294 | 96719 | 97210 | 98340 |
| 20 | Provinsi Sumatera Barat | 5534472 | 5580232 | 5640629 | 5757210 | 5836160 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

3. Kondisi Sosial dan Budaya

Kondisi sosial di Provinsi Sumatera Barat yang perlu dibahas pada penelitian ini paling utama tentu saja disparitas pendapatan. Data disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan dari kategori sedang ke rendah dengan angka menurun dari 0,305 pada tahun 2020 menjadi 0,283 pada tahun 2024. Sebagian besar kabupaten, seperti Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, dll, menunjukkan disparitas rendah. Sementara Kabupaten Pasaman yang awalnya tinggi mengalami penurunan. Di sisi kota contohnya Kota Padang berada dalam kategori sedang dengan fluktuasi signifikan.

Tabel 4. 2
Disparitas Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten & Kota
Sumatera Barat

| No | Kabupaten & Kota | Gini Ratio (%) | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab.Kep.Mentawai | 0.273 | 0.321 | 0.233 | 0.259 | 0.267 |
| 2 | Kab.Pesisir Selatan | 0.264 | 0.253 | 0.246 | 0.259 | 0.224 |
| 3 | Kab.Solok | 0.277 | 0.246 | 0.243 | 0.235 | 0.241 |
| 4 | Kab.Sijunjung | 0.269 | 0.270 | 0.243 | 0.263 | 0.239 |
| 5 | Kab.Tanah Datar | 0.273 | 0.250 | 0.251 | 0.260 | 0.258 |
| 6 | Kab.Padang Pariaman | 0.257 | 0.269 | 0.245 | 0.257 | 0.253 |
| 7 | Kab.Agam | 0.278 | 0.272 | 0.298 | 0.255 | 0.249 |
| 8 | Kab.Lima Puluh Kota | 0.222 | 0.244 | 0.208 | 0.194 | 0.220 |
| 9 | Kab.Pasaman | 0.310 | 0.248 | 0.230 | 0.243 | 0.217 |
| 10 | Kab.Solok Selatan | 0.307 | 0.277 | 0.253 | 0.271 | 0.313 |
| 11 | Kab.Dharmasraya | 0.280 | 0.268 | 0.287 | 0.291 | 0.233 |
| 12 | Kab.Pasaman Barat | 0.258 | 0.261 | 0.277 | 0.238 | 0.240 |
| 13 | Kota Padang | 0.312 | 0.343 | 0.354 | 0.312 | 0.324 |
| 14 | Kota Solok | 0.286 | 0.277 | 0.288 | 0.256 | 0.251 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 0.300 | 0.295 | 0.314 | 0.308 | 0.299 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0.394 | 0.306 | 0.296 | 0.273 | 0.266 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 0.265 | 0.286 | 0.317 | 0.255 | 0.272 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 0.325 | 0.316 | 0.311 | 0.316 | 0.313 |
| 19 | Kota Pariaman | 0.310 | 0.301 | 0.272 | 0.289 | 0.281 |
| 20 | Provinsi Sumatera Barat | 0.305 | 0.306 | 0.300 | 0.280 | 0.283 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Kemudian kondisi sosial yang selanjutnya adalah persentase kemiskinan. Persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi, dimulai dari 6,28% pada tahun

2020, meningkat menjadi 6,63% pada tahun 2021, sebelum turun signifikan menjadi 5,92% pada tahun 2022, dan sedikit meningkat kembali menjadi 5,95% pada tahun 2023, serta mencapai 5,97% pada tahun 2024. Di tingkat kabupaten dan kota terdapat variasi yang signifikan dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat angka kemiskinan tertinggi sebesar 14,84% pada tahun 2021, sementara Kota Solok dan Kota Sawahlunto memiliki angka terendah, masing-masing 2,77% dan 2,16% pada tahun 2020. Beberapa kabupaten seperti Sijunjung dan Tanah Datar menunjukkan penurunan konsisten dalam angka kemiskinan, sedangkan Kabupaten Padang Pariaman dan Agam mengalami fluktuasi yang lebih besar. Meskipun ada penurunan angka kemiskinan tetap saja disparitas antar kabupaten dan kota menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terfokus untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah.

Namun dibalik semua kondisi sosial yang dapat bermasalah tersebut, Provinsi Sumatera Barat memiliki budaya yang berhubungan dengan masalah tersebut. Budaya Sumatera Barat atau dikenal dengan Minangkabau, memiliki ciri khas yang unik karena menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Hal ini tercermin dalam pembagian harta pusaka atau pendistribusian kekayaan perempuan memiliki peran penting sebagai pewaris utama. Selain itu, adat Minangkabau mengedepankan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yang berarti adat istiadat berlandaskan ajaran Islam. Keunikan budaya Minangkabau yang dinamis, sekaligus menjaga nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Hal ini sangat bertolak belakang dengan data kondisi sosial Provinsi Sumatera Barat tadi.

B. Deskripsi Data Penelitian

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik deskriptif meliputi penyajian data

melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, mean, median (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi ataupun perhitungan persentase. Statistik deskriptif menjelaskan nilai rata-rata (mean) dari data, standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa data yang berkaitan bervariasi dengan rata-rata, kemudian nilai minimum yaitu nilai terkecil dari data yang diteliti, dan nilai maksimum yaitu nilai terbesar yang diteliti. Statistik deskriptif menjadi awal dari penelitian agar dapat melihat penyebaran data yang akan diolah dengan uji-uji yang lain. Berikut ini hasil dari statistik deskriptif yang telah dilakukan;

Tabel 4.3
Hasil statistik deskriptif

| | X1 | X2 | Y |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Mean | 12.27022 | 1.736811 | -1.306021 |
| Median | 12.38800 | 1.829000 | -1.313000 |
| Maximum | 13.76900 | 2.697000 | -0.931000 |
| Minimum | 10.35200 | 0.770000 | -1.640000 |
| Std. Dev. | 0.831399 | 0.385081 | 0.121083 |
| Skewness | -0.200672 | -0.237845 | 0.140309 |
| Kurtosis | 1.930546 | 3.944563 | 3.300076 |
| | | | |
| Jarque-Bera | 5.164871 | 4.427317 | 0.668134 |
| Probability | 0.075590 | 0.109300 | 0.716006 |
| | | | |
| Sum | 1165.671 | 164.9970 | -124.0720 |
| Sum Sq. Dev. | 64.97509 | 13.93904 | 1.378142 |
| | | | |
| Observations | 95 | 95 | 95 |

Menurut tabel diatas pada variable X1 Jumlah penduduk menunjukkan;

Rata-rata dari sekumpulan data. Dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah nilai. Ini memberikan gambaran umum tentang lokasi pusat data. Nilai rata-rata (mean) X1 12.27022, X2 1.736811 dan Y 1.306021 artinya nilai rata rata dari masing-masing variable

jumlah penduduk yaitu 12.27022 kemiskinan 1.736811 disparitas pendapatan -1.306021 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat.

Nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Median berguna untuk menunjukkan posisi tengah dalam distribusi, terutama jika ada outlier. Nilai tengah (median) menunjukkan X1 12.38800 X2 1.829000 Y -1.313000 artinya nilai tengah dari jumlah penduduk yaitu 12.38800 kemiskinan 1.829000 disparitas pendapatan -1.313000 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat.

Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dalam sekumpulan data. Ini membantu dalam memahami batas atas dari data yang dianalisis. Nilai maksimum X1 13.76900, X2 2.697000 dan Y -0.931000 artinya nilai maksimum dari masing-masing variable jumlah penduduk yaitu 13.76900 kemiskinan 2.697000 disparitas pendapatan -0.931000 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat.

Nilai minimum adalah nilai terendah dalam sekumpulan data. Ini memberikan batas bawah dari data yang dianalisis. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dalam sekumpulan data. Ini membantu dalam memahami batas atas dari data yang dianalisis. Nilai minimum X1 10.35200, X2 0.770000 dan Y -0.931000 artinya nilai terkecil dari masing-masing variable jumlah penduduk yaitu 10.35200 kemiskinan 0.770000 disparitas pendapatan -1.640000 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat.

Ukuran variasi atau penyebaran dari sekumpulan data. Semakin tinggi nilai standar deviasi, semakin besar variasi dalam data. Ini dihitung sebagai akar kuadrat dari varians. Nilai standar deviasi atau penyebaran data X1 0.831399, X2 0.385081 dan Y 0.121083 artinya nilai standar deviasi dari masing-masing variable jumlah penduduk yaitu 0.831399 kemiskinan 0.385081, disparitas pendapatan 0.121083 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat.

C. Hasil Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu regresi data panel dengan jumlah cross section 19 kabupaten dan kota dan time series 5 tahun menggunakan alat bantu Eviews 12. Berikut adalah data keseluruhan variable yang diperlukan dalam analisis data:

Tabel 4. 3
Data keseluruhan variable

| No | Kabupaten & Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | | Kemiskinan (%) | | | | | Gini Ratio (%) | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab.Kep.Mentawai | 87623 | 88389 | 89401 | 91430 | 92760 | 14.35 | 14.84 | 13.97 | 13.72 | 13.89 | 0.273 | 0.321 | 0.233 | 0.259 | 0.267 |
| 2 | Kab.Pesisir Selatan | 504418 | 509618 | 516518 | 525360 | 532910 | 7.61 | 7.92 | 7.11 | 7.34 | 7.49 | 0.264 | 0.253 | 0.246 | 0.259 | 0.224 |
| 3 | Kab.Solok | 391497 | 394237 | 397829 | 405380 | 410430 | 7.81 | 8.01 | 7.12 | 7.13 | 7.31 | 0.277 | 0.246 | 0.243 | 0.235 | 0.241 |
| 4 | Kab.Sijunjung | 235045 | 237313 | 240317 | 243710 | 246780 | 6.78 | 6.80 | 6.00 | 5.88 | 5.78 | 0.269 | 0.270 | 0.243 | 0.263 | 0.239 |
| 5 | Kab.Tanah Datar | 371704 | 373693 | 376276 | 383680 | 388230 | 4.40 | 4.54 | 4.26 | 4.16 | 4.28 | 0.273 | 0.250 | 0.251 | 0.260 | 0.258 |
| 6 | Kab.Padang Pariaman | 430626 | 433018 | 436129 | 451390 | 459170 | 6.95 | 7.22 | 6.25 | 6.34 | 6.27 | 0.257 | 0.269 | 0.245 | 0.257 | 0.253 |
| 7 | Kab.Agam | 529138 | 534202 | 540905 | 551890 | 55930 | 6.75 | 6.85 | 6.22 | 6.60 | 6.83 | 0.278 | 0.272 | 0.298 | 0.255 | 0.249 |
| 8 | Kab.Lima Puluh Kota | 383525 | 385634 | 388375 | 396430 | 401090 | 6.86 | 7.29 | 6.59 | 6.80 | 6.92 | 0.222 | 0.244 | 0.208 | 0.194 | 0.220 |
| 9 | Kab.Pasaman | 299851 | 303103 | 307425 | 31320 | 318080 | 7.16 | 7.48 | 6.85 | 6.80 | 6.74 | 0.310 | 0.248 | 0.230 | 0.243 | 0.217 |
| 10 | Kab.Solok Selatan | 182027 | 184854 | 188649 | 191540 | 195030 | 7.15 | 7.52 | 6.51 | 6.45 | 6.56 | 0.307 | 0.277 | 0.253 | 0.271 | 0.313 |
| 11 | Kab.Dharmasraya | 228591 | 231217 | 234713 | 239920 | 244030 | 6.23 | 6.67 | 5.56 | 5.56 | 5.32 | 0.280 | 0.268 | 0.287 | 0.291 | 0.233 |
| 12 | Kab.Pasaman Barat | 431672 | 436313 | 442479 | 450050 | 456470 | 7.04 | 7.51 | 6.93 | 6.92 | 7.00 | 0.258 | 0.261 | 0.277 | 0.238 | 0.240 |
| 13 | Kota Padang | 909040 | 913448 | 919145 | 942940 | 954180 | 4.40 | 4.94 | 4.26 | 4.17 | 4.06 | 0.312 | 0.343 | 0.354 | 0.312 | 0.324 |
| 14 | Kota Solok | 73438 | 74469 | 75850 | 77840 | 79460 | 2.77 | 3.12 | 3.02 | 3.05 | 3.07 | 0.286 | 0.277 | 0.288 | 0.256 | 0.251 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 65138 | 65687 | 66413 | 67760 | 68730 | 2.16 | 2.38 | 2.28 | 2.27 | 2.33 | 0.300 | 0.295 | 0.314 | 0.308 | 0.299 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 56311 | 56971 | 57850 | 58630 | 59450 | 5.24 | 5.92 | 5.14 | 5.24 | 5.31 | 0.394 | 0.306 | 0.296 | 0.273 | 0.266 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 121028 | 121588 | 122311 | 124050 | 125020 | 4.54 | 5.14 | 4.46 | 4.11 | 4.08 | 0.265 | 0.286 | 0.317 | 0.255 | 0.272 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 139576 | 141184 | 143325 | 144830 | 146730 | 5.65 | 6.16 | 5.66 | 5.44 | 5.19 | 0.325 | 0.316 | 0.311 | 0.316 | 0.313 |
| 19 | Kota Pariaman | 94224 | 95294 | 96719 | 97210 | 98340 | 4.10 | 4.38 | 4.13 | 4.20 | 4.26 | 0.310 | 0.301 | 0.272 | 0.289 | 0.281 |
| 20 | Provinsi Sumatera Barat | 5534472 | 5580232 | 5640629 | 5757210 | 5836160 | 6.28 | 6.63 | 5.92 | 5.95 | 5.97 | 0.305 | 0.306 | 0.300 | 0.280 | 0.283 |

Sebelum melakukan analisis data perlu dilakukan tabulasi data dan penyamaan satuan antara variable yang berbeda menjadi satu satuan saja. Hal ini bisa dilakukan dengan Logaritma Natural (LN). Dalam analisis data, seringkali kita dihadapkan pada variabel dengan satuan yang berbeda, yang dapat menyulitkan perbandingan dan interpretasi. Dalam kasus seperti ini, menggunakan transformasi logaritma (LN) dapat menjadi solusi yang efektif. Transformasi logaritma membantu menormalkan data, sehingga variabel dengan skala yang berbeda dapat dianalisis secara bersamaan. Dengan menerapkan LN, kita mengubah data menjadi bentuk yang lebih seragam,

yang dapat mengurangi efek skala dan memudahkan identifikasi pola atau hubungan di antara variabel.

Selain itu, penggunaan logaritma dapat membantu mengatasi masalah distribusi data yang tidak normal, sehingga analisis statistik yang lebih lanjut menjadi lebih valid. Dengan demikian, transformasi LN memungkinkan analisis yang lebih akurat dan bermakna ketika berhadapan dengan variabel yang beragam dalam skala dan satuan.

Penyamaan satuan data dapat dilakukan dengan cara log atau LN data. setelah dilakukan log data maka data yang dimasukkan dalam pengujian atau yang akan diuji adalah data hasil log atau LN tersebut. Alat analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif estimasi model data panel, kemudian uji pemilihan model data panel, uji asumsi klasik dan hipotesis.

1. Estimasi Model Regresi Data Panel

Adapun penentu model estimate dalam model regresi yaitu dengan menggunakan data panel yang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain (Basuki, 2021)

a. Common Effect Model (CEM)

Common Effect merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat kecil untuk mengestimasi model dan panel. Dari uji model CEM yang telah dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Common Effect Model

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -0.841780 | 0.173223 | -4.859515 | 0.0000 |
| X1 | -0.025001 | 0.014658 | -1.705656 | 0.0914 |
| X2 | -0.090665 | 0.031647 | -2.864894 | 0.0052 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------|
| Root MSE | 0.111686 | R-squared | 0.140145 |
| Mean dependent var | -1.306021 | Adjusted R-squared | 0.121453 |
| S.D. dependent var | 0.121083 | S.E. of regression | 0.113492 |
| Akaike info criterion | -1.483098 | Sum squared resid | 1.185002 |
| Schwarz criterion | -1.402449 | Log likelihood | 73.44713 |
| Hannan-Quinn criter. | -1.450509 | F-statistic | 7.497405 |
| Durbin-Watson stat | 0.755917 | Prob(F-statistic) | 0.000963 |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil regresi dengan Common Effect Model (CEM) menunjukkan bahwa terdapat nilai konstanta sebesar -0.841780 dengan probabilitas sebesar 0.0000, persamaan regresi pada nilai Adjusted R-squared sebesar 0,121453 saja, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan mampu menjelaskan variabel disparitas pendapatan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 12,1453% sedangkan sisanya yaitu 88% (100 nilai adjusted R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. Model fixed effect adalah teknik estimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk mendeteksi perbedaan intersep. Intercept antar perusahaan, perbedaan intersep dapat muncul karena perbedaan budaya kerja, manajemen dan perawatan intensif. Selain itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi ditetapkan antara perusahaan dan waktu. Dari uji

model FEM yang telah dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Hasil Fixed Effect Model

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C | -2.171397 | 0.433557 | -5.008327 | 0.0000 |
| X1 | 0.021247 | 0.027008 | 0.786693 | 0.4340 |
| X2 | 0.348152 | 0.155301 | 2.241787 | 0.0280 |
| Cross-section fixed (dummy variables) | | | | |
| Root MSE | 0.068691 | R-squared | 0.674737 | |
| Mean dependent var | -1.306021 | Adjusted R-squared | 0.586829 | |
| S.D. dependent var | 0.121083 | S.E. of regression | 0.077830 | |
| Akaike info criterion | -2.076281 | Sum squared resid | 0.448258 | |
| Schwarz criterion | -1.511740 | Log likelihood | 119.6233 | |
| Hannan-Quinn criter. | -1.848164 | F-statistic | 7.675425 | |
| Durbin-Watson stat | 2.114479 | Prob(F-statistic) | 0.000000 | |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil regresi dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa terdapat nilai kostanta sebesar -2.171397 dengan probabilitas sebesar 0.0000, persamaan regresi pada nilai Ajusted R-squared sebesar 0.586829 ssja, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan mampu menjelaskan variabel disparitas pendapatan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 58,6829% sedangkan sisanya yaitu 42% (100 nilai adjusted R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

c. Random Effect Model (REM)

Model ini memperkirakan data panel di mana variabel gangguan mungkin terkait dari waktu ke waktu dan antar individu. Dalam model efek acak, perbedaan intersep diperhitungkan oleh kondisi kesalahan masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model efek acak adalah bahwa heteroskedastisitas dihilangkan. Model ini juga dikenal dengan teknologi GLS (Generalized Least Square).

Tabel 4. 6
Random Effect Model

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -1.102383 | 0.240371 | -4.586175 | 0.0000 |
| X1 | -0.008401 | 0.019522 | -0.430328 | 0.6680 |
| X2 | -0.057897 | 0.053096 | -1.090439 | 0.2784 |

| Weighted Statistics | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Root MSE | 0.079589 | R-squared | 0.016009 |
| Mean dependent var | -0.496835 | Adjusted R-squared | -0.005382 |
| S.D. dependent var | 0.080659 | S.E. of regression | 0.080876 |
| Sum squared resid | 0.601763 | F-statistic | 0.748407 |
| Durbin-Watson stat | 1.487823 | Prob(F-statistic) | 0.475978 |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Berdasarkan hasil regresi dengan Random Effect Model (REM) menunjukkan bahwa terdapat nilai konstanta sebesar -1.102383 dengan probabilitas sebesar 0.0000, persamaan regresi pada nilai Adjusted R-squared sebesar -0.005382 saja, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan mampu menjelaskan variabel disparitas pendapatan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 00,5382% sedangkan sisanya yaitu 100% (100 nilai adjusted R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menganalisis data panel, perlu dilakukan pengujian spesifikasi model yang benar untuk mendeskripsikan data mana yang paling baik dan paling cocok, untuk memilih model mana yang paling cocok maka akan dilakukan pengujian, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman dan uji LM jika hasil antar dua uji diatas berbeda. (Cakra & Yasin, 2020). Adapun uji yang dimaksud yaitu:

a. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk menentukan model yang akan digunakan Pooled Least Squares atau fixed effect. Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan Uji Chow yaitu:

- 1) H_0 diterima jika $prob > 0.05$, maka menggunakan model Pool Common Effect.
- 2) H_a diterima jika $prob < 0.05$, maka menggunakan Fixed Effect.

Hipotesis nol pada uji ini adalah bahwa intersep sama atau dengan kata lain. Model yang benar untuk regresi data panel adalah efek umum, dan hipotesis alternatifnya adalah bahwa intersep tidak sama atau model yang benar untuk regresi data panel adalah efek tetap.

Nilai statistik F mengikuti statistik F dengan derajat kebebasan penunjuk. M adalah jumlah batasan atau batasan dalam model tanpa variabel dummy. Jumlah batasan adalah jumlah orang dikurangi satu. N adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah parameter dengan efek tetap.

Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikalikan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter pada model fixed effect (k) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Jika nilai F hitung lebih besar dari F kritis, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti model regresi data panel yang benar adalah model efek tetap. Sebaliknya jika nilai F' hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis noi diterima, yang berarti model regresi data panel yang benar adalah model efek umum Setelah dilakukan uji chow didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Hasil uji chow

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|---------|--------|
| Cross-section F | 6.756904 | (18,74) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 92.352420 | 18 | 0.0000 |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Nilai Prob $0,0000 < 0.05$ Maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya model yang terpilih adalah model fixed effect atau FEM. Jika model yang terpilih adalah FEM maka dilanjutkan dengan uji hausman.

b. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk menentukan model yang akan digunakan Random Effect atau Fixed Effect. Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan uji chow:

- 1) H_0 diterima jika prob > 0.05 , maka menggunakan model Random Effect.
- 2) H_a diterima jika prob < 0.05 , maka menggunakan Fixed Effect. Statistik uji hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Square dengan derajat Freedom (df) sama dengan jumlah variabel independent.

Hipotesis nol adalah model yang benar untuk regresi data panel adalah model efek acak, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang benar untuk regresi data panel adalah model efek tetap. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Square maka hipotesis nol ditolak, artinya model regresi data panel yang benar adalah model fixed-effect. Sebaliknya jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis Chi-Square maka hipotesis nol diterima yang berarti model yang sesuai untuk regresi data adalah model random effect.

Setelah dilakukan uji hausman didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Uji Hausman

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 9.341107 | 2 | 0.0094 |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Nilai Prob $0,0094 < 0.05$ Maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya model yang terpilih adalah model FEM. Jika model yang terpilih adalah FEM Kembali secara berturut-turut maka tidak perlu dilanjutkan dengan uji LM. Karena uji Lm dilakukan untuk memastikan model mana yang paling tepat untuk dipilih jika hasil dari uji chow dan uji hausman memperoleh hasil yang berbeda.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk menguji kelayakan model regresi. Penggunaan uji asumsi klasik adalah untuk menentukan bagaimana variabel bebas Jumlah Penduduk dan Kemiskinan (X) mempengaruhi variabel terikat Disparitas Pendapatan (Y) (Nani, 2022). Ada empat dalam pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Kemudian jika sampel sudah mencukupi 30 sampel atau lebih maka data dianggap normal.

Begitupun uji asumsi klasik untuk regresi data panel hanya uji yang diperlukan saja yang dipakai yaitu menurut Basuki and Prawoto, 2015 Uji normalitas bukan syarat wajib agar estimasi BLUE (Best Linier Unbias Estimator) sebagian pendapat mengemukakan Uji normalitas bukan menjadi syarat wajib dalam regresi data panel. Uji yang wajib dilakukan pada metode OLS dalam data panel ialah hanya uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas Model FEM dan CEM digunakan pada pendekatan OLS untuk itu uji Normalitas tidak perlu dilakukan. Oleh sebab itu uji asumsi klasik normalitas dalam penelitian ini tidak dilakukan (Ramahdani, 2023).

Uji uji yang dilakukan sebagai berikut:

a. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah ketika residual untuk pengamatan satu dengan yang lain berkorelasi menurut runtut waktu. Tidak ada masalah autokorelasi, menurut model regresi yang baik. Dalam suatu model, pengujian autokorelasi dilakukan untuk menentukan ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e_i) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (e_{t-1}). Pengujian ini dilakukan pada sampel data seri waktu, di mana n adalah periode waktu. Uji Durbin-Watson dan Run Test adalah dua contoh uji statistik yang sering digunakan.

Tabel 4. 9
Hasil Fixed Effect Model

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C | -2.171397 | 0.433557 | -5.008327 | 0.0000 |
| X1 | 0.021247 | 0.027008 | 0.786693 | 0.4340 |
| X2 | 0.348152 | 0.155301 | 2.241787 | 0.0280 |
| Cross-section fixed (dummy variables) | | | | |
| Root MSE | 0.068691 | R-squared | 0.674737 | |
| Mean dependent var | -1.306021 | Adjusted R-squared | 0.586829 | |
| S.D. dependent var | 0.121083 | S.E. of regression | 0.077830 | |
| Akaike info criterion | -2.076281 | Sum squared resid | 0.448258 | |
| Schwarz criterion | -1.511740 | Log likelihood | 119.6233 | |
| Hannan-Quinn criter. | -1.848164 | F-statistic | 7.675425 | |
| Durbin-Watson stat | 2.114479 | Prob(F-statistic) | 0.000000 | |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Hasi Uji autokorelasi diperoleh nilai DL 1,623 DU 1,709 < DW 2,114 < 4-DL 2,377 4-DU 2,291 Maka tidak terjadinya autokorelasi pada data atau lulus uji autokorelasi.

b. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Jika ada, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya terganggu. Selain itu, tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menghindari kebiasaan dalam mengambil kesimpulan mengenai pengaruh uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Toleransi dengan batas minimal sebesar 0,10 atau Variance Inflation Factor (VIF) maksimal 10 adalah nilai cut off yang biasa digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala multikolinieritas.

- 1) **Toleransi > 0.1**: Menunjukkan bahwa variabel tidak memiliki multikolinieritas yang signifikan dan dapat dianggap relatif independen.
- 2) **Toleransi < 0.1**: Menunjukkan adanya potensi multikolinieritas. Variabel ini mungkin sangat berkorelasi dengan variabel independen lainnya.

Dan hasil dari pengujian multikolinieritas data penelitian ini adalah :

Tabel 4. 10
Hasil Uji Multikolinieritas

| | X1 | X2 |
|----|----------|----------|
| X1 | 1,000000 | 0,278119 |
| X2 | 0,278119 | 1,000000 |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Koefisien korelasi X1 dan X2 $0,1 < 0,278119 < 10$, kemudian atau keseluruhan data tidak melebihi batas VIF atau dibawah batas VIF maka dapat disimpulkan terbebas dari multikolinieritas atau lolos uji

multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah ada ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam model regresi yang mempengaruhi persyaratan, kesamaan varians antara residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, yang dikenal sebagai homoskedastisitas. Dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dan SRESID (nilai residualnya) dapat mengidentifikasi homoskedastisitas dengan menggunakan metode plot dispersi. Jika grafik tidak menunjukkan pola tertentu, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit, maka model yang baik akan dihasilkan. Uji Glejser uji statistik yang dapat digunakan, dan uji Spearman dapat digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan uji glejser Jika masing-masing variabel memiliki signifikansi 0,05 maka model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas (Nani, 2022).

Dan hasil dari pengujian multikolinieritas data penelitian ini adalah :

Tabel 4. 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 0.019012 | 0.250019 | 0.076040 | 0.9396 |
| X1 | 0.017311 | 0.015574 | 1.111493 | 0.2700 |
| X2 | -0.104210 | 0.089557 | -1.163616 | 0.2483 |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Nilai Prob X1 0,2700 > 0,05 dan X2 0,2483 > 0,05 maka dapat disimpulkan terbebas dari heterokedastisitas atau lolos uji heterokedastisitas.

4. Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan dua data time series dan cross section. Secara teknis data panel dapat memberikan data yang informatif, mengurangi kolinearitas antar perubahan, serta meningkatkan efisiensi (Tri Basuki, 2021).

Dalam penelitian ini, analisis regresi digunakan untuk mengetahui apa pengaruh Jumlah Penduduk (X1), Kemiskinan (X2) terhadap Disparitas Pendapatan (Y) dihitung dengan menggunakan rumus persamaan garis regresi data berganda sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + e$$

Keterangan:

Y = Disparitas Pendapatan

X1 = Jumlah Penduduk

X2 = Kemiskinan

A = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien

i = Jumlah

t = Waktu

e = Error

Hasil pengujian regresi data panel sebagai berikut;

Tabel 4. 12
Hasil Fixed Effect Model

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C | -2.171397 | 0.433557 | -5.008327 | 0.0000 |
| X1 | 0.021247 | 0.027008 | 0.786693 | 0.4340 |
| X2 | 0.348152 | 0.155301 | 2.241787 | 0.0280 |
| Cross-section fixed (dummy variables) | | | | |
| Root MSE | 0.068691 | R-squared | 0.674737 | |
| Mean dependent var | -1.306021 | Adjusted R-squared | 0.586829 | |
| S.D. dependent var | 0.121083 | S.E. of regression | 0.077830 | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|----------|
| Akaike info criterion | -2.076281 | Sum squared resid | 0.448258 |
| Schwarz criterion | -1.511740 | Log likelihood | 119.6233 |
| Hannan-Quinn criter. | -1.848164 | F-statistic | 7.675425 |
| Durbin-Watson stat | 2.114479 | Prob(F-statistic) | 0.000000 |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e$$

$$\text{LN Y} = -2,17139707234 + 0,0212467651151 \text{ LN X1} + 0,348151687206 \text{ LN X2}$$

$$\text{LN Y} = -2,17 + 0,02 \text{ LN X1} + 0,34 \text{ LN X2}$$

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta negative menunjukkan pengaruh negative sebesar - 2,1714 artinya tanpa adanya variable jumlah penduduk (X1), dan kemiskinan (X2), maka variabel disparitas pendapatan (Y) akan bernilai sangat kecil juga yaitu menjadi negative 217%. Bisa dibayangkan jika tidak ada jumlah penduduk di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat maka tentu saja tidak mungkin ada lagi disparitas pada pendapatannya bahkan nilainya negative atau berarti sangat tidak mungkin ada lagi disparitas pendapatan. Namun jika dilihat secara variable jumlah penduduk memang tidak mungkin terjadi demikian karena tidak mungkin dalam suatu daerah tidak memiliki penduduk untuk menghilangkan disparitas pendapatan tersebut.
- 2) Nilai koefisien beta variabel jumlah penduduk (X1) sebesar 0,0212, jika omaka variable Disparitas Pendapatan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 2%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami penurunan 1%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 2%.

- 3) Nilai koefisien beta variabel kemiskinan (X_2) sebesar 0,3482, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Disparitas Pendapatan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 34%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami penurunan 1 %, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 34%..

5. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji hipotesis yang dilakukan dengan cara uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji signifikansi koefisien variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Pengujian ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas.

H_0 = Jika variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

H_a = Jika variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Penolakan dan penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika t hitung lebih besar dari t tabel (t hitung $>$ t tabel) atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($\text{Prob} < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, maka secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika t hitung lebih kecil dari t tabel (t hitung $<$ t tabel) atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($\text{Prob} > 0,05$), yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima, maka secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dan setelah dilakukan pengujian hasilnya menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4. 13
Hasil Uji t

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -2.171397 | 0.433557 | -5.008327 | 0.0000 |
| X1 | 0.021247 | 0.027008 | 0.786693 | 0.4340 |
| X2 | 0.348152 | 0.155301 | 2.241787 | 0.0280 |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Maksud dari tabel adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Uji t variable X1 (Jumlah Penduduk) diperoleh nilai t hitung $0.786693 < t$ tabel yaitu 1,98580 dan nilai prob. $0,4340 > 0,05$ Maka H_a ditolak dan H_0 diterima yaitu variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi sumatera barat tahun 2020-2024.
- 2) Hasil Uji t variable X2 (Kemiskinan) diperoleh nilai t hitung $2.241787 < t$ tabel yaitu 1,98580 dan nilai prob. $0,0280 < 0,05$ Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu variable kemiskinan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi sumatera barat tahun 2020-2024.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas.

H_0 = Jika semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

H_a = Jika semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Penolakan dan penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika f hitung lebih besar dari f tabel (f hitung $>$ f tabel) atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($\text{Prob} < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, maka simultan (bersama-sama) semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika f hitung lebih kecil dari f tabel (f hitung $<$ f tabel) atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($\text{Prob} > 0,05$), yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima, maka secara simultan (bersama-sama) semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Setelah dilakukan pengujian hasilnya menunjukkan tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 14
Hasil Uji f

| Cross-section fixed (dummy variables) | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Root MSE | 0.068691 | R-squared | 0.674737 |
| Mean dependent var | -1.306021 | Adjusted R-squared | 0.586829 |
| S.D. dependent var | 0.121083 | S.E. of regression | 0.077830 |
| Akaike info criterion | -2.076281 | Sum squared resid | 0.448258 |
| Schwarz criterion | -1.511740 | Log likelihood | 119.6233 |
| Hannan-Quinn criter. | -1.848164 | F-statistic | 7.675425 |
| Durbin-Watson stat | 2.114479 | Prob(F-statistic) | 0.000000 |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Dilihat dari tabel tersebut pada bagian F-statistik dapat mengartikan bahwasannya hasil uji F variable X1 dan X2 (Jumlah Penduduk & Kemiskinan) diperoleh nilai f hitung 7,675425 > f tabel yaitu 2,70 dan nilai prob. 0,000000 < 0,05 Maka H0 ditolak dan Ha diterima yaitu variabel jumlah penduduk dan kemiskinan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi sumatera barat tahun 2020-2024.

c. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Untuk itu pengujian hipotesis yang digunakan adalah: Besarnya koefisien determinasi (R²) adalah 0 berbanding 1.

Semakin dekat koefisien determinasi (R²) dari suatu persamaan regresi ke 1, maka semakin besar pengaruh semua pengaruh independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan untuk menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya, semakin dekat koefisien determinasi atau persamaan regresi ke 0, maka semakin kecil pengaruh ketergantungan terhadap nilai variabel independen (semakin kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen).

Setelah dilakukan pengujian didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Cross-section fixed (dummy variables) | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Root MSE | 0.068691 | R-squared | 0.674737 |
| Mean dependent var | -1.306021 | Adjusted R-squared | 0.586829 |
| S.D. dependent var | 0.121083 | S.E. of regression | 0.077830 |
| Akaike info | -2.076281 | Sum squared | 0.448258 |

| critierion | | resid | |
|-------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Schwarz critierion | -1.511740 | Log likelihood | 119.6233 |
| Hannan-Quinn criter. | -1.848164 | F-statistic | 7.675425 |
| Durbin-Watson stat | 2.114479 | Prob(F- statistic) | 0.000000 |

Sumber : Hasil Output E-Views12, data diolah.

Bisa dilihat pada bagian adjusted R-square bahwasannya nilai adjusted R Square sebesar 0.586829 atau 58,6829%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan mampu menjelaskan variabel disparitas pendapatan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 58,6829% sedangkan sisanya yaitu 41,4% (100 nilai adjusted R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

Hasil pengujian signifikansi secara parsial pada variabel jumlah penduduk didapatkan hasil bahwasannya jumlah penduduk ini tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.

Ketidakcocokan dengan teori menurut argumen empiris Todaro dan Smith yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk biasanya akan meningkatkan disparitas pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi tidak serta merta mempengaruhi disparitas pendapatan di daerah tersebut, mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi disparitas pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum teori menyatakan bahwa pertumbuhan populasi dapat meningkatkan disparitas pendapatan, kenyataannya di lapangan

dapat berbeda, tergantung pada berbagai faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, kondisi sosial dan ekonomi yang spesifik di daerah tersebut juga berpengaruh. Misalnya, jika pertumbuhan populasi diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan investasi dalam infrastruktur, maka disparitas pendapatan dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teori menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk biasanya berhubungan dengan disparitas pendapatan, kenyataannya dapat berbeda tergantung pada konteks lokal dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, angka jumlah penduduk yang tinggi tidak selalu berimplikasi langsung pada peningkatan disparitas pendapatan jika diiringi dengan langkah-langkah yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

- a. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan: Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, untuk memastikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk diiringi dengan peningkatan kualitas hidup. Investasi dalam layanan ini akan membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses peluang yang lebih baik.
- b. Fokus pada Pendidikan: Kebijakan pendidikan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Program beasiswa dan pelatihan keterampilan dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bersaing di pasar kerja.
- c. Program Redistribusi Sumber Daya: Mengimplementasikan kebijakan redistribusi sumber daya yang lebih adil agar manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja.

d. Monitoring Populasi: Penting untuk melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan populasi dan dampaknya terhadap disparitas pendapatan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Selanjutnya, Ketika tidak berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan maka dapat dikatakan bahwasannya adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, keberadaan sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja juga dapat memainkan peran penting dalam mengurangi disparitas, karena memberikan peluang bagi kelompok berpendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka meskipun jumlah penduduk meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Sukma, Sherenia Melati (2021) dalam penelitiannya " Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Untuk hasil regresi dengan tingkat alfa sebesar 0.05 dalam penelitian tersebut didapatkan hasil jumlah penduduk juga tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan dan hanya pendidikan yang berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

Hasil pengujian signifikansi secara parsial pada variabel kemiskinan didapatkan hasil bahwasannya kemiskinan ini berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.

Hal ini sejalan dengan teori menurut argumen empiris Todaro dan Smith yang menyatakan bahwa perluasan kemiskinan dapat mempengaruhi disparitas pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa benar adanya yang diungkapkan dalam teori bahwa kemiskinan selalu diikuti dengan disparitas pendapatan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan

tidak selalu berimbang negatif terhadap disparitas pendapatan. Bisa diperkirakan mungkin disebabkan oleh faktor lainnya yang berhasil mendistribusikan pendapatan secara lebih merata.

Kemiskinan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan karena individu yang hidup dalam kondisi miskin sering kali terjebak dalam siklus ketidakberdayaan. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan lapangan pekerjaan yang layak membuat kelompok miskin sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini menciptakan perbedaan pendapatan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin, di mana kelompok berpendapatan rendah tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kemiskinan menjadi faktor yang memperburuk ketidaksetaraan pendapatan di masyarakat. Ini menegaskan bahwa penanganan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan, di mana kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengelolaan jumlah penduduk dilakukan secara bersamaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan memahami hubungan kompleks antara jumlah penduduk dan kemiskinan, pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa kebijakan terkait hasil penelitian ini:

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi: Mengembangkan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Ini akan membantu mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan.
- b. Akses Modal untuk Usaha Kecil: Menyediakan akses yang lebih baik terhadap modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah dapat memberikan pinjaman dengan bunga rendah atau hibah untuk membantu masyarakat memulai atau mengembangkan usaha mereka.

- c. Kebijakan Perlindungan Sosial: Mengimplementasikan program perlindungan sosial yang komprehensif, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi untuk kebutuhan dasar, termasuk pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ini akan membantu meringankan beban finansial keluarga miskin.
- d. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Ini dapat dilakukan dengan membangun sekolah dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil serta memberikan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
- e. Kebijakan Redistribusi Sumber Daya: Menerapkan kebijakan redistribusi sumber daya yang lebih adil, termasuk pajak progresif yang lebih tinggi untuk individu berpendapatan tinggi, dan menggunakan dana tersebut untuk program-program pengentasan kemiskinan.
- f. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan NGO: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menciptakan program-program yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan, seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Selain itu, faktor-faktor lain seperti kebijakan redistribusi pendapatan dan program sosial juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi disparitas pendapatan. Jika pemerintah mengimplementasikan program yang efektif untuk meningkatkan akses layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, maka dampak negatif dari kemiskinan terhadap disparitas pendapatan dapat diminimalkan. Di sisi lain, jika kebijakan tidak berpihak pada kelompok miskin, maka disparitas pendapatan akan semakin melebar. Oleh karena itu, meskipun kemiskinan berkontribusi pada disparitas pendapatan, intervensi yang tepat dapat membantu mengurangi ketimpangan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hindun, Ady Soetejo “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pendidikan dan kemiskinan berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sementara pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

Hasil pengujian signifikansi secara simultan pada variabel jumlah penduduk dan kemiskinan didapatkan hasil bahwasannya jumlah penduduk dan kemiskinan ini berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di kabupaten & kota provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.

Hal ini sejalan dengan teori menurut argumen empiris Todaro dan Smith yang menyatakan bahwa terdapat tujuh konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk yang pesat yakni salah satunya kemiskinan kemudian setelahnya disparitas pendapatan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan kemiskinan yang meluas memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan terutama di kalangan kelompok miskin. Peningkatan jumlah penduduk khususnya di kalangan yang paling rentan meningkatkan tekanan pada sumber daya dan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang sering kali mengalami penghematan anggaran pemerintah sehingga mengurangi akses kelompok miskin terhadap program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Todaro, 2020).

Jumlah penduduk dan kemiskinan berpengaruh secara bersama-sama terhadap disparitas pendapatan karena keduanya saling memperkuat dampak negatif satu sama lain. Pertumbuhan populasi yang pesat sering kali meningkatkan jumlah individu yang berada dalam kondisi miskin, menciptakan tekanan yang lebih besar pada sumber daya yang terbatas. Dalam konteks ini, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan

menjadi semakin terbebani, sehingga kualitas dan aksesibilitasnya menurun. Akibatnya, kelompok miskin mengalami lebih banyak kesulitan dalam mengakses peluang yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, yang pada gilirannya memperburuk disparitas pendapatan di masyarakat.

Selain itu, faktor-faktor struktural seperti ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kebijakan ekonomi yang tidak inklusif juga memainkan peran penting dalam hubungan ini. Kebijakan yang tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dapat memperlebar jurang disparitas pendapatan. Misalnya, jika investasi pemerintah lebih terfokus pada daerah kaya sambil mengabaikan daerah miskin, maka disparitas pendapatan akan semakin mencolok. Oleh karena itu, interaksi antara jumlah penduduk yang tumbuh pesat dan kemiskinan yang meluas menciptakan tantangan yang kompleks dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan, menuntut perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Variable Jumlah Penduduk (X1) ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan (Y) di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024. Dengan hasil uji diperoleh nilai t hitung 0,4340 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,66140 sedangkan untuk jumlah penduduk nilai signifikansi 0,4340 yaitunya besar dari 0,05.
2. Variable Kemiskinan (X2) ditemukan berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan (Y) di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024. Dengan hasil uji diperoleh nilai t hitung 0,0280 kecil dari t tabel yaitu 1,66140 sedangkan untuk kemiskinan nilai signifikansi 0,0280 yaitunya kecil dari 0,05.
3. Variable Jumlah Penduduk (X1) Kemiskinan (X2) ditemukan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Disparitas Pendapatan (Y) di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024. Dengan hasil uji diperoleh nilai f hitung 7,675425 besar dari f tabel yaitu 2,70 sedangkan untuk jumlah penduduk dan kemiskinan nilai signifikansi 0,000000 yaitu kurang dari 0,05.

B. Saran

1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang lebih terfokus pada pengurangan kemiskinan, mengingat dampak signifikan kemiskinan terhadap disparitas pendapatan. Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus diperkuat agar masyarakat berpendapatan rendah dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, akses pendidikan yang lebih baik perlu menjadi prioritas dengan investasi dalam infrastruktur pendidikan dan penyediaan beasiswa untuk

anak-anak dari keluarga kurang mampu. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi disparitas pendapatan, seperti pengangguran dan kesehatan. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam upaya mengatasi kemiskinan dan disparitas pendapatan.

2. Peningkatan Akses Pendidikan

Meningkatkan akses pendidikan harus menjadi prioritas utama untuk mengurangi disparitas pendapatan. Pemerintah dapat menyediakan lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin. Program pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan. Pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran juga sangat penting. Dengan pendidikan yang lebih baik, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

3. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha mikro dan kecil sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan akses modal bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Selain itu, menciptakan pasar lokal untuk produk-produk UMKM dapat membantu meningkatkan pendapatan. Program-program pemasaran dan branding juga perlu dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan mendukung usaha lokal, diharapkan dampak positif terhadap disparitas pendapatan dapat tercapai.

4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi kemiskinan dan disparitas pendapatan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui efektivitas program-program tersebut dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pengumpulan data yang akurat dan transparan juga harus

dilakukan untuk mendukung proses evaluasi. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi juga sangat penting agar suara mereka didengar. Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Karimuddin, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Agam Firdaus, M. I. H. (2023). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk , Upah Minimum Kabupaten , Pengangguran , dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab / Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022 Abstrak*. 21(3), 1–8.
- Arianto, S. (2023). *Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Publikasi Disparitas Pendapatan*. BPS-RI.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan bisnis Islam (Dilengkapi Dengan Penggunaan EVIEWS)*. ISBN.
- BPS Indonesia. (2021). *Publikasi Kemiskinan Mikro dan Makro*. BPS-RI.
- Cakra, R. E., & Yasin, H. (2020). *Spatial Data Panel*. WADE Group.
- Frisnoiry, S., Putri, I. E., Sari, N. I., Regina, C., & Kartio, A. (2024). *Analisis Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada Tahun 2023*. 3(5), 1360–1367.
- Harahap, I. R. J. & E. F. (2024). Faktor Penentu Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Kota Sumatera Barat. *Journal Economic Develoment*, 02, 175.
- Hendra, S. (2021). *Mikroekonomi Paul A Samuelson dan William D. Nordhaus*. Erlangga.
- Hindun, A. S. D. (2019). *Pengaruh Pendidikan , Pengangguran , dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. 8(3), 250–265.
- Huda, N. (2020). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media.
- Jonardi, I. R., & Harahap, E. F. (2024). *Di Kabupaten Kota Sumatera Barat*. 02(02), 174–180.
- KBBI. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Kemendigbud.
- Kemensos. (2023). *Pengentasan Kemiskinan Jadi Solusi Mensos Tangkal Masalah Sosial di Masyarakat* (A. M. Ulya (ed.)). Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- Nani. (2022). *Step by Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews*. Cv Visi Intelegensia.
- Rahmadi, S. (2021). *Pembangunan Ekonomi Kependudukan Ricardo Dalam teory Jhingan*. media utama.
- Ramahdani, L. (2023). Alokasi Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Sumatera Barat. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 34–42.
- Rosana, E. (2020). Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan*, 14, 22.
- Santoso, F. D. P., & Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 02, 147.
- Todaro, M. P. dan Smith. (2020). *Economic Development (Thirteenth)*. Pearson.
- World Bank. (2020). *Gini Index Ratio*. World Bank.
- World Bank. (2022). *Kemiskinan Indonesia*. World Bank.
- World Bank. (2023). *Masalah Klasik Ekonomi*. World Bank.
- Zasriati, M. (2022). *Ekonomi Pembangunan teory Sjafrizal*. Media Utama.